

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN MUARA ENIM**

**Jalan Jenderal A. Yani No 14
Muara Enim
Telp/Fax. (0734) 424690 & 421175**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan karena atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian kabupaten Muara Enim Tahun 2025 ini dapat disusun. Rencana Kerja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan penyusunan RKA-SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025, sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja SKPD.

Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Rencana Kerja SKPD Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025 ini akan tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya manusia di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim, sehingga hasilnya diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam rangka merencanakan pembangunan daerah 2024-2026.

Muara Enim Januari 2024
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika ,
Statistik dan Persandian
Kabupaten Muara Enim



Ardian Anfanardi, AP.,M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 197407201993111001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMINFO KAB. MUARA ENIM TAHUN 2023 DAN CAPAIAN RENSTRA	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023 dan Capaian Renstra SKPD.....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim.....	30
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim	32
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	49
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	50
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	52
3.1 Telaahan terhadap RPD dan Kebijakan Nasional.....	52
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim.....	53
3.3 Program dan Kegiatan.....	53
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	58
BAB V PENUTUP	59

BAB 1	PENDAHULUAN
------------------------	--------------------

1.1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Terkait dengan amanat dari peraturan perundang-undangan tersebut di atas serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim telah menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, selanjutnya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim sebagai Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim menjabarkan urusan yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya ke dalam Rencana Strategis untuk jangka waktu 3 tahun

Atas dasar alur tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim menyusun Rencana Kerja SKPD tahun 2025 yang menyajikan target Kerja SKPD tahun 2025 dalam upaya pelaksanaan amanat yang tertuang dalam Rencana Strategis serta tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang sekaligus merupakan komitmen Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian untuk mewujudkan rencana strategis tahun 2024-2026.

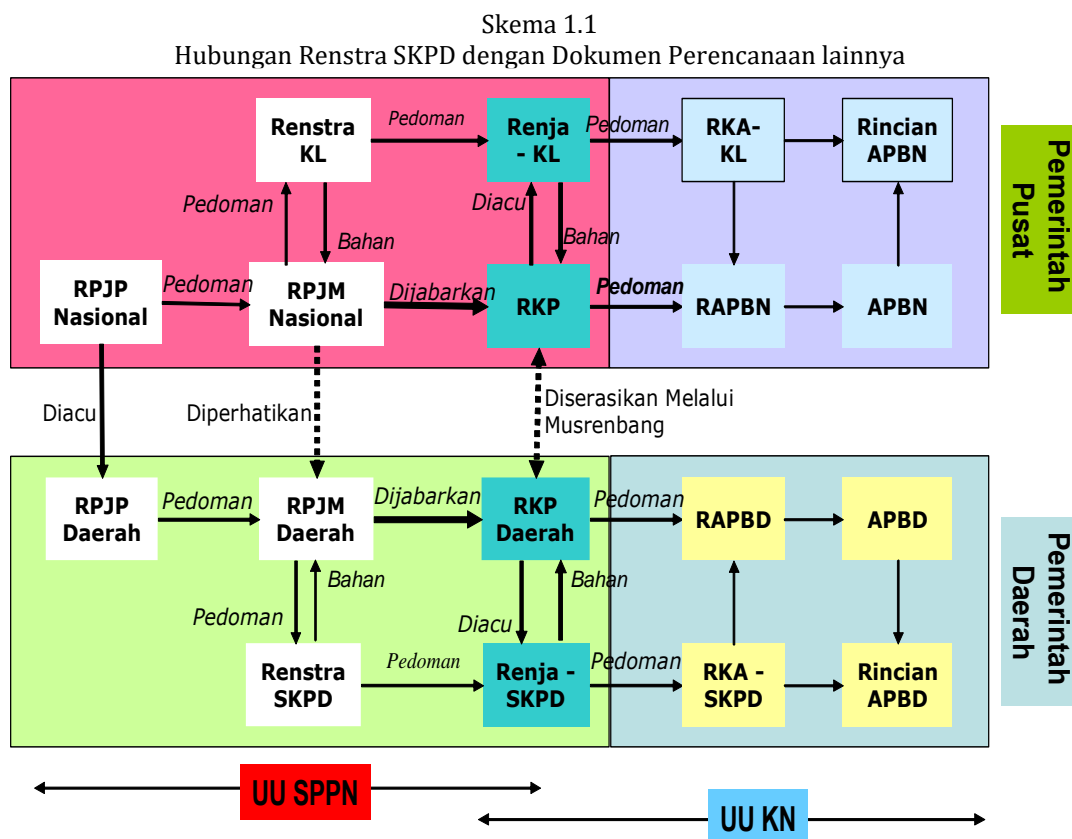
Dengan disusunnya Rencana Kerja SKPD sebagai rencana tahun 2025, maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian akan dapat lebih memfokuskan arah pelaksanaan sasaran-sasaran yang tertuang dalam rencana

strategis dengan disertai strategi pencapaiannya melalui program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2025.

Penetapan di muka rencana Kerja SKPD kegiatan dan sasaran akan memberi daya dorong (*drive*) sekaligus sebagai komitmen merencanakan dan mengendalikan sumber daya yang diserahkan kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dan akan dilaporkan penggunaannya lewat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada akhir Tahun 2025.

Renja SKPD merupakan acuan dalam penyusunan RKA-SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah). Muatan RKA meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan output/outcome. Sehingga perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan daerah. Critical pointnya adalah menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan output/outcome.

Dari uraian diatas secara umum hubungan antara Rencana Kerja SKPD Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim dengan Dokumen Perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem perencanaan dan penganggaran, baik skala nasional maupun daerah dapat dilihat pada skema 1.1 sebagai berikut.



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang mewajibkan setiap SKPD untuk memiliki Rencana Kerja (Renja-SKPD) diamanatkan beberapa peraturan perundangan, antara lain :

1. Undnag-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang- undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasioanal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. *Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keunagan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Permendagri nomor 86 tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)

11. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi & Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
13. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2) terakhir telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Nomor 8 tahun 2019) ;
15. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2023 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 18 Tahun 2023 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah sebagai penjabaran dari RKPD dan Renstra SKPD Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi institusi.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah :

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai SKPD yang membantu Kabupaten Muara Enim;
2. Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Tupoksi SKPD Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim.

3. Mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel, partisipatif dan tepat sasaran.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang.
- 1.2 Landasan Hukum.
- 1.3 Maksud dan Tujuan.
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SKPD DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2023

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2023 dan Capaian Renstra SKPD Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2023
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim.
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Kominfo

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berdasarkan urusan, kewenangan dan tanggung jawab setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan, pada tahun 2023 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim telah menyusun kebijakan pembangunan daerah yang diimplementasikan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dituangkan dalam APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2023.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam melaksanakan tugasnya mengemban 3 urusan yaitu urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian. Pada Tahun 2023, alokasi belanja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim sebesar **Rp.25.187.387.097,-** terealisasi sebesar **Rp.24.598.953.497,-** atau **97,66 %** dan kinerja keluaran (*output*) sebesar **99,95%** dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Operasi

Belanja Belanja Operasi dialokasikan sebesar **Rp.22.681.867.677,-** terealisasi sebesar **Rp.22.122.356.347,-** atau **97,53%** yang diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan lainnya yang masuk dalam komponen belanja operasi, yang diarahkan untuk membiayai belanja :

1. Belanja gaji dan tunjangan PNS, pembulatan gaji, tambahan penghasilan PNS berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya serta Tunjangan Kinerja PNS/CPNS dialokasikan sebesar **Rp. 4.310.109.556,00** terealisasi sebesar **Rp. 4.059.269.150,00** atau **94,18 %**.
2. Belanja barang dan jasa yang dialokasikan sebesar **Rp. 18.371.758.121,00** terealisasi sebesar **Rp. 18.063.087.197,00** atau **98,32%**.

b. Belanja Modal

Belanja modal dialokasikan sebesar **Rp.2.505.519.420,-** terealisasi **Rp. 2.476.597.150,-** atau **98,85 %** yang dialokasikan untuk membiayai belanja modal yang menjadi aset Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan capaian program indikator sasaran yang berkaitan langsung dengan target kinerja sasaran dalam renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim serta permasalahan dan solusi dapat dijelaskan sebagai berikut :

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Pada Tahun 2023, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim melaksanakan 5 program, 14 Kegiatan dan 45 sub kegiatan antara lain yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Alokasi anggaran untuk program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Sebesar **Rp.7.108.138.847,-** dengan realisasi sebesar **Rp.6.762y.581.430,-** atau **95,14%** program ini terdiri dari 8 (Delapan) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Alokasi anggaran untuk kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Sebesar **Rp.44.239.100,-** dengan realisasi sebesar **Rp.39.933.900,-** atau **90.27%** kegiatan ini terdiri dari 6 (Enam) sub kegiatan sebagai berikut :

a. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD

Dengan anggaran sebesar **Rp. 18.906.100,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.17.879.000,-** atau sebesar **94,57%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen RKA-SKPD yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

b. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp.7.216.800,- dan realisasi keuangan sebesar

Rp.6.288.000,- atau sebesar **87,13%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

- c. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar **Rp.4.714.800,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.3.763.000,-** atau sebesar **79,81%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen DPA-SKPD yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
- d. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar **Rp.2.340.000,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.2.194.400,-** atau sebesar **93,78%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
- e. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan anggaran sebesar **Rp.5.019.500,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.4.580.000,-** atau sebesar **91,24%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang ditargetkan sebanyak 12 laporan dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
- f. Sub kegiatan Evaluasi kinerja perangkat daerah dengan anggaran sebesar **Rp.6.041.900,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.5.229.500,-** atau sebesar **86,55%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen LPPD ditargetkan sebanyak 1 dokumen dan jumlah dokumen AKIP ditargetkan sebanyak 5 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Alokasi anggaran untuk kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah sebesar **Rp.4.322.548.156,-** dengan realisasi sebesar **Rp.4.070.489.150,-** atau **94.17%**. Kegiatan ini terdiri dari 3 (Tiga) sub kegiatan yaitu antara lain :

- a. Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan anggaran sebesar **Rp.4.310.109.556,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.4.059.269.150,-** atau sebesar **94,18%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN ditargetkan sebanyak 34 Orang dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
- b. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun dengan anggaran sebesar **Rp.7.765.400,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.7.206.000,-** atau sebesar **92,80%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang ditargetkan sebanyak 10 buku dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
- c. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dengan anggaran sebesar **Rp.4.673.200,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.4.014.000,-** atau sebesar **85,89%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang ditargetkan sebanyak 2 laporan keuangan semesteran dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Alokasi anggaran untuk kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah sebesar **Rp.30.357.950,-** dengan realisasi sebesar **Rp.29.827.500,-** atau **98,25%**. Kegiatan ini terdiri dari satu sub kegiatan antara lain :

- a. Sub kegiatan pengamanan barang milik daerah SKPD dengan anggaran sebesar **Rp.30.357.950,-** dengan realisasi sebesar **Rp.29.827.500,-** atau **98,25%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD yang ditargetkan sebanyak 1 Dokumen kendaraan dinas/operasional dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Alokasi anggaran untuk kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah sebesar **Rp.71.490.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp.71.325.000,-** atau **99,77%**. Kegiatan ini terdiri dari 1 (Satu) sub kegiatan antara lain :

- a. Sub kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya dengan anggaran sebesar **Rp.17.490.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp.17.325.000,-** atau **99,06%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
- b. Sub kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi dengan anggaran sebesar **Rp.54.000.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp.54.000.000,-** atau **100%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah SDM yang mengikuti bimtek/pelatihan yang ditargetkan sebanyak 14 orang dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Alokasi anggaran untuk kegiatan administrasi umum perangkat daerah sebesar **Rp.1.706.632.470,-** dengan realisasi **Rp.1.652.068.259,-** atau **96,80%**. Kegiatan ini terdiri dari 8 (Delapan) kegiatan antara lain :

- a. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor dengan anggaran sebesar **Rp.19.247.300,-** dengan realisasi sebesar **Rp.18.637.000,-** atau **96,83%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ditargetkan sebanyak 1 paket dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
- b. Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan anggaran sebesar **Rp.612.033.170,-** dengan realisasi sebesar **Rp.600.609.000,-** atau **98,13%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah dan jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan yang ditargetkan sebanyak 8 paket dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

- c. Sub kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga dengan anggaran sebesar **Rp. 35.611.300,-** dengan realisasi sebesar **Rp.33.776.000,-** atau **94,85%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan yang ditargetkan sebanyak 1 jPaket dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
- d. Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor dengan anggaran sebesar **Rp.119.894.900,-** dengan realisasi sebesar **Rp.105.206.000,-** atau **87,75%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan yang ditargetkan sebanyak 2 paket dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
- e. Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan anggaran sebesar **Rp.30.269.200,-** dengan realisasi sebesar **Rp.28.518.250,-** atau **94,22%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan yang ditargetkan sebanyak 1 paket dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
- f. Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan anggaran sebesar **Rp.13.569.600,-** dengan realisasi sebesar **Rp.11.880.000,-** atau **87,55%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang ditargetkan sebanyak 10 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
- g. Sub kegiatan fasilitasi kunjungan tamu dengan anggaran sebesar **Rp.16.080.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp.11.660.000,-** atau **72,51%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu yang ditargetkan sebanyak 24 laporan dengan capaian output/keluaran sebesar **83,33%**.
- h. Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar **Rp.859.927.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp.841.782.009,-** atau **97,89%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang ditargetkan sebanyak 150 laporan dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Alokasi anggaran untuk kegiatan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sebesar **Rp.36.751.200,-** dengan realisasi **Rp.36.735.000,-** atau **99,96%**. Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan antara lain :

- a. Sub kegiatan pengadaan Mebel dengan anggaran sebesar **Rp.36.751.200,-** dengan realisasi sebesar **Rp.36.735.000.000,-** atau 99,96%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah paket mebel yang disediakan yang ditargetkan sebanyak 3 paket dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

7. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Alokasi anggaran untuk kegiatan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sebesar **Rp.298.378.750,-** dengan realisasi **Rp.272.776.200,-** atau **91,42%**. Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat dengan anggaran sebesar **Rp.9.497.200,-** dengan realisasi sebesar **Rp.9.300.000,-** atau **97,92%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat yang ditargetkan sebanyak 3 laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- b. Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan anggaran sebesar **Rp.172.801.550,-** dengan realisasi sebesar **Rp.147.396.200,-** atau **85,30%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang harus dibayar yang ditargetkan sebanyak 3 laporan dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
- c. Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan anggaran sebesar **Rp.116.080.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp.116.080.000,-** atau **100%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang ditargetkan sebanyak 3 laporan dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Alokasi anggaran untuk kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah sebesar **Rp.597.741.221,-** dengan realisasi **Rp.589.426.421,-** atau **98,61%**. Kegiatan ini terdiri dari 3 (Tiga) sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan anggaran sebesar **Rp.178.699.541,-** dengan realisasi sebesar **Rp.175.643.741,-** atau **98,29%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dan yang dibayar pajak yang ditargetkan sebanyak 14 unit dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
- b. Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar **Rp.250.131.680,-** dengan realisasi sebesar **Rp.249.592.680,-** atau **99,78%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara yang ditargetkan sebanyak 1 unit gedung kantor dan bandengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
- c. Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dengan anggaran sebesar **Rp.142.450.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp.139.145.000,-** atau **97,68%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara/rehabilitasi ditargetkan sebanyak 5 unit yaitu pemeliharaan Hardware peralatan radio, pemeliharaan software peralatan radio, pemeliharaan personal komputer/laptop, printer dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
- d. Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya dengan anggaran sebesar **Rp.26.460.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp.25.045.000,-** atau **94,65%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara/rehabilitasi yang ditargetkan sebanyak 3 unit yaitu pemeliharaan

TV, pemeliharaan AC dan pemeliharaan instalasi listrik dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

2. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Alokasi anggaran untuk program informasi dan komunikasi publik sebesar **Rp. 7.513.051.000,-** dengan realisasi **Rp.7.452.034.474,-** atau **99,19%**. program ini terdiri dari 1 (Satu) kegiatan dan 7 (Tujuh) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotam

Alokasi anggaran untuk kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah Kabupaten/Kota sebesar **Rp. 7.513.051.000,-** dengan realisasi **Rp.7.452.034.474,-** atau **99,19%**. Kegiatan ini terdiri dari 7 (Tujuh) sub kegiatan berikut :

- a. Sub kegiatan monitoring opini dan aspirasi publik dengan anggaran sebesar **Rp.151.645.400,-** dengan realisasi sebesar **Rp.145.764.557,-** atau **96,12%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil monitoring opini dan aspirasi publik yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
- b. Sub kegiatan pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik dengan anggaran sebesar **Rp.1.005.411.500,-** dengan realisasi sebesar **Rp.991.392.459,-** atau **98,61%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini jumlah dokumen hasil pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik yang ditargetkan sebanyak 5 dokumen yaitu melalui baliho, spanduk, leaflet, billboard, majalah dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
- c. Sub kegiatan pengelolaan media komunikasi publik dengan anggaran sebesar **Rp.388.077.200,-** dengan realisasi sebesar **Rp.380.480.382,-** atau **98,04%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

- d. Sub kegiatan pelayanan informasi publik dengan anggaran sebesar **Rp.108.486.900,-** dengan realisasi sebesar **Rp.106.584.014,-** atau **98,25%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
- e. Sub kegiatan layanan hubungan media dengan anggaran sebesar **Rp.52.203.800,-** dengan realisasi sebesar **Rp.51.597.972,-** atau **98,84%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah layanan hubungan media yang ditargetkan sebanyak 1 layanan dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
- f. Sub kegiatan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dengan anggaran sebesar **Rp.104.237.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp.102.567.220,-** atau **98,40%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah sumber daya komunikasi publik yang meningkat kapasitasnya yang ditargetkan sebanyak 33 kelompok dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
- g. Sub kegiatan penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunikasi dengan anggaran sebesar **Rp.5.702.989.200,-** dengan realisasi sebesar **Rp.5.673.647.872,-** atau **99,49%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan yang ditargetkan sebanyak 7 dokumen adventorial yaitu majalah, media online, media TV, media tv gretings, surat kabar harian/mingguan, media buku, media kanal (online) yaitu dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

3. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA

Alokasi anggaran untuk program aplikasi informatika sebesar **Rp.9.853.849.650,-** dengan realisasi **Rp.9.691.734.748,-** atau **98,35%**. Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan pemerintah pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Alokasi anggaran untuk kegiatan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan pemerintah pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar **Rp. 6.545.930.900,-** terealisasi sebesar **Rp. 6.464.973.157,-** atau **98,76%**. Kegiatan ini terdiri dari satu sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub kegiatan penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah dengan anggaran sebesar **Rp. 6.545.930.900,-** terealisasi sebesar **Rp. 6.464.973.157,-** atau **98,76%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah sistem jaringan intra pemerintah daerah yang ditargetkan sebanyak 5 jenis yaitu bandwich Internet, metro ethernet, Internet Via Vsat, Collocation, firewall dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
2. Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk kegiatan pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar **Rp.3.307.918.750,-** terealisasi sebesar **Rp.3.226.761.591,-** atau **97,55%**. Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub kegiatan penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan anggaran sebesar **Rp.389.700.700,-** dengan realisasi sebesar **Rp.379.114.054,-** atau **97,28%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
- b. Sub kegiatan pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik dengan anggaran sebesar **Rp.265.161.350,-** dengan realisasi sebesar **Rp.257.790.727,-** atau **97,22%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan yang ditargetkan sebanyak 2 aplikasi dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
- c. Sub kegiatan pengembangan dan pengelolaan ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas dengan anggaran sebesar **Rp.345.332.700,-**

dengan realisasi sebesar **Rp.344.022.700,-** atau **99,90%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai masterplan smart city yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

- d. Sub kegiatan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah dengan anggaran sebesar **Rp.2.307.724.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp.2.245.834.110,-** atau **97,32%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

4. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Alokasi anggaran untuk program penyelenggaraan statistik sektoral sebesar **Rp, 373.079.100,-** terealisasi **Rp. 362.602.268,-** atau **97,19%**. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota sebesar **Rp, 373.079.100,-** terealisasi **Rp. 362.602.268,-** atau **97,19%**. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral dengan anggaran sebesar **Rp.309.368.200,-** dengan realisasi sebesar **Rp.300.044.818,-** atau **96,99%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
- b. Sub kegiatan peningkatan kapasitas SDM pemda dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi dengan anggaran sebesar **Rp.63.710.900** dengan realisasi sebesar **Rp.62.557.450,-** atau **98,19%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah SDM yang

meningkat kapasitasnya dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi yang ditargetkan sebanyak 50 orang dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Alokasi anggaran untuk program program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi sebesar **Rp. 339.268.500,-** terealisasi **Rp.330.000.575,-** atau **92,27%**. Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota sebesar **Rp, 271.056.500,-** terealisasi **Rp. 263.749.900,-** atau **97,30%**. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut :

a. Sub kegiatan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik dengan anggaran sebesar **Rp.174.387.200,-** dengan realisasi sebesar **Rp.170.736.250,-** atau **97,91%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

b. Sub kegiatan penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota dengan anggaran sebesar **Rp.96.669.300,-** dengan realisasi sebesar **Rp.93.013.650,-** atau **96,62%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota yang ditargetkan sebanyak 1 OPD dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

2. Kegiatan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten/kota.

Alokasi anggaran untuk kegiatan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten/kota sebesar **Rp. 68.212.000,-** terealisasi **Rp. 66.250.675,-** atau **97,12%**. Kegiatan ini terdiri dari 1 (dua) sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub kegiatan operasionalisasi jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dengan anggaran sebesar **Rp.68.212.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 66.250.675,-** atau **97,12%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah jumlah perangkat daerah yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi yang ditargetkan sebanyak 9 OPD dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

Evaluasi hasil pelaksanaan renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dapat diuraikani pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1													
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dan													
Pencapaian Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistk dan Persandian s/d Tahun 2024													
Kabupaten Muara Enim													
Nama SKPD : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim													
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renja Perangakt Daerah) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2025	
								Target Renja Perangakt Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangakt Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2				3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/(5+6))
					Urusan Wajib								
2					Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar								
2	1	0			Program Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	6	1											

					Daerah Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah									
2	1 6	0 1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan yang dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	1 6	0 1	2.0 1	0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	
2	1 6	0 1	2.0 1	0 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	
2	1 6	0 1	2.0 1	0 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	
2	1 6	0 1	2.0 1	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	
2	1 6	0 1	2.0 1	0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%	

					SKPD	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
2	1 6	0 1	2.0 1	0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100%	5 dokumen	5 dokumen	100%	
1	1 6	0 1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	1 6	0 1	2.0 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang	34 Orang	35 Orang	35 Orang	100%	35 Orang	35 Orang	100%	
1	1 6	0 1	2.0 2	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%	
1	1 6	0 1	2.0 2	0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 laporan keuangan semesteran	2 laporan keuangan semesteran	2 laporan keuangan semesteran	2 laporan keuangan semesteran	100%	2 laporan keuangan semesteran	2 laporan keuangan semesteran	100%	

											-				
2	1 6	0 1	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	1 6	0 1	2.0 3	0 2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100 %	
2	1 6	0 1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	1 6	0 1	2.0 5	0 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	19 Orang	19 Orang	14 Orang	14 Orang	100%	21 Orang	35 Orang	100 %	
2	1 6	0 1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	1 6	0 1	2.0 6	0 1	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100 %	

2	1 6	0 1	2.0 6	0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	10 Paket	10 Paket	100%	7 Paket	17 Paket	100 %
2	1 6	0 1	2.0 6	0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	3 Paket	3 Paket	100%	1 Paket	4 Paket	100 %
2	1 6	0 1	2.0 6	0 4	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	100 %
2	1 6	0 1	2.0 6	0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100 %
2	1 6	0 1	2.0 6	0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	10 Dokumen	10 Dokumen	100 %
2	1 6	0 1	2.0 6	0 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24 kali	24 kali	12 Kali	12 Kali	100%	12 Kali	12 Kali	100 %
2	1 6	0 1	2.0 6	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 laporan	150 laporan	150 Laporan	150 Laporan	100%	150 laporan	300 Laporan	100 %
2	1 6	0 1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

					Daerah	pemerintah daerah									
2	1 6	0 2	2.0 7	0 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	1 Unit Kendaraan Roda 4	1 Unit Kendaraan Roda 4	100%	-	1 Unit Kendaraan Roda 4	100 %	
2	1 6	0 1	2.0 7	0 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	4 Paket	100 %	
2	1 6	0 1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	1 6	0 1	2.0 8	0 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	4 Laporan	100 %	
2	1 6	0 1	2.0 8	0 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	6 Laporan	100 %	
2	1 6	0 1	2.0 8	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	6 Laporan	100 %	
2	1 6	0 1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase sarana dan prasarana barang milik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

					Urusan Pemerintahan Daerah	daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara								
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	19 Unit	19 Unit	19 Unit	100%	19 Unit	19 Unit	100 %
2	1	0	2.0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Gedung Kantor	1 Gedung Kantor	1 Gedung Kantor	1 Gedung Kantor	100%	1 Gedung Kantor	1 Gedung Kantor	100 %
2	1	0	2.0	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	2 Unit	35 Unit	35 Unit	100%	35 Unit	35 Unit	100 %
2	1	0	2.0	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	19 Unit	19 Unit	100%	19 Unit	19 Unit	100 %
2	1				Urusan Pemerintahan Bidang komunikasi dan Informatika									

2	1 6	0 2			Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi yang didiseminasikan dan dipublikasikan								
2	1 6	0 2	2.0 1		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media komunikasi publik yang dikelola	6 Jenis Media (Media cetak, Media Penyiaran, Media Daring, Media Sosial, Media Luar Ruang dan Media Tatap Muka)	6 Jenis Media (Media cetak, Media Penyiaran, Media Daring, Media Sosial, Media Luar Ruang dan Media Tatap Muka)	6 Jenis Media (Media cetak, Media Penyiaran, Media Daring, Media Sosial, Media Luar Ruang dan Media Tatap Muka)	6 Jenis Media (Media cetak, Media Penyiaran, Media Daring, Media Sosial, Media Luar Ruang dan Media Tatap Muka)	100%	6 Jenis Media (Media cetak, Media Penyiaran, Media Daring, Media Sosial, Media Luar Ruang dan Media Tatap Muka)	6 Jenis Media (Media cetak, Media Penyiaran, Media Daring, Media Sosial, Media Luar Ruang dan Media Tatap Muka)	100%
2	1 6	0 2	2.0 1	0 2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	1 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100 %
2	1 6	0 2	2.0 1	0 4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %

					Komunikasi Publik	Komunikasi Publik								
2	1 6	0 2	2.0 1	0 5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
2	1 6	0 2	2.0 1	0 6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
2	1 6	0 2	2.0 1	0 7	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	1 Layanan Media Center	1 Layanan Media Center	1 Layanan Media Center	1 Layanan Media Center	100%	1 Layanan Media Center	1 Layanan Media Center	100 %
	1 6	0 2	2.0 1	1 0	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	450 Orang	450 Orang	450 Orang	450 Orang	100%	450 Orang	450 Orang	100 %
2	1 6	0 2	2.0 1	1 2	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	7 Dokumen	7 Dokumen	100 %
2	1 6	0 3			Program Aplikasi Informatika	Persentase terlayannya kebutuhan aptika OPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %
2	1 6	0 3	2.0 1		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan	- Persentase OPD yang terhubung jaringan VPN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

					Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
2	1	0	2.0	0	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100%	5 Jenis	5 Jenis	100 %
2	1	0	2.0		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	- Persentase OPD yang terhubung jaringan VPN	2,4	2,4	2,4	2,4	100%	2,4	2,4	100%
2	1	0	2.0	0	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
2	1	0	2.0	0	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	2 Aplikasi	2 Aplikasi	2 Aplikasi	2 Aplikasi	100%	2 Aplikasi	2 Aplikasi	100 %
2	1	0	2.0	0	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
2	1	0	2.0	1	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %

					dan Komunikasi Pemerintah	arsitektur dan peta rencana SP									
2	2	0			Urusan Pemerintahan Bidang Statistik										
2	2	0	2		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data statistik sektoral yang di mutakhirkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	2	0	2	2.0	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media penyajian data statistik sektoral	3 (IPM, Sosial Ekonomi Kabupaten Muara Enim dan Aplikasi Sister)	3 (IPM, Sosial Ekonomi Kabupaten Muara Enim dan Aplikasi Sister)	3 (IPM, Sosial Ekonomi Kabupaten Muara Enim dan Aplikasi Sister)	3 (IPM, Sosial Ekonomi Kabupaten Muara Enim dan Aplikasi Sister)	100%	3 (IPM, Sosial Ekonomi Kabupaten Muara Enim dan Aplikasi Sister)	3 (IPM, Sosial Ekonomi Kabupaten Muara Enim dan Aplikasi Sister)	100%	
2	2	0	2	2.0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	3 Dokumen (IPM, Sosek dan Sensus Mandiri Desa)	3 Dokumen (IPM, Sosek dan Sensus Mandiri Desa)	3 Dokumen (IPM, Sosek dan Sensus Mandiri Desa)	3 Dokumen (IPM, Sosek dan Sensus Mandiri Desa)	100%	3 Dokumen (IPM, Sosek dan Sensus Mandiri Desa)	3 Dokumen (IPM, Sosek dan Sensus Mandiri Desa)	100 %
2	2	0	2	2.0	0	Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	100%	200 Orang	200 Orang	100 %

					yang Terintegrasi									
2	2				Urusan Pemerintahan Bidang Persandian									
1														
2	2	0			Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase terpenuhinya keamanan Informasi Pemerintah Daerah	90%	90%	90%	90%	100%	90%	90%	100 %
1	2	2												
2	2	0	2.0		Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi sandi yang diamankan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	2	2	1											
2	2	0	2.0	0	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100 %
1	2	2	1	3										
2	2	0	2.0	0	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	48 OPD	48 OPD	57 OPD	57 OPD	100%	57 OPD	57 OPD	100 %
1	2	2	1	4										

2	2 1	0 2	2.0 2		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang melaksanakan jaringan komunikasi sandi	17 OPD	17 OPD	57 OPD	57 OPD	100%	57 OPD	57 OPD	100%
2	2 1	0 2	2.0 2	0 1	Operasioanalisis Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi	17 OPD	17 OPD	57 OPD	57 OPD	100%	57 OPD	57 OPD	100%

Dari hasil evaluasi program/kegiatan pada Tahun 2025 di atas, tidak ada sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatik, Statistik dan Persandian semuanya mencapai target kinerja.

Implikasi yang timbul terhadap capaian Program Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim

Dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim sesuai dengan Renstra memiliki implikasi terhadap Indikator Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2024-2026. Adapun Indikator Bidang Komunikasi dan Informatika adalah sebagai Berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023
Indeks SPBE	Indeks	3.00
Persentase informasi publik yang tersedia dan diumumkan sesuai UU No.14 tahun 2008 tentang KIP	Persen	90

Berdasarkan standar penilai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB), Indeks SPBE hasil evaluasi eksternal Pemerintah Kabupaten Muara Enim dikategorikan baik. Nilai indeks SPBE tahun 2023 sebesar 3,00 mengalami peningkatan dibandingkan dengan hasil evaluasi tahun 2022 yang nilai indeksnya 2,91, Dengan diterapkannya instrumen baru ini terdapat penyesuaian dalam penilaian untuk pencapaian peningkatan target indeks SPBE yang sudah ditetapkan.

Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2023 ini akan menjadi *baseline* kondisi penerapan dengan kesesuaian kriteria dan kondisi yang harus dipenuhi, diharapkan laporan hasil evaluasi(LHE) SPBE dapat digunakan dalam menentukan strategi tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE dimasa mendatang dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi nasional.

Pencapaian target indikator kinerja Persentase informasi publik yang tersedia dan diumumkan sesuai UU No.14 tahun 2008 tentang KIP pada tahun 2023 di targetkan sebesar 90 % terealisasi sebesar 100%.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim untuk mendukung Target Indikator Bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan rencana strategis organisasi perangkat daerah, adapun dampak atau implikasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dan dampaknya terhadap indikator kinerja Sebagai berikut :

Indikator Indeks SPBE

Program Aplikasi Informatika

1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan :
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Pada Sub Kegiatan ini untuk meningkatkan konektivitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) saat ini Kabupaten Muara Enim sudah menerapkan 100% sambungan internet dengan menggunakan Fiber optik (FO) ke seluruh Perangkat Daerah termasuk 22 Kecamatan di Muara Enim sudah terhubung kabel fiber optik yang jauh lebih efisien dengan menggunakan sewa metro ethernet untuk kecamatan. Untuk jaringan internet dalam kota yang melayani internet ke setiap OPD dibangun secara mandiri atau menggunakan kabel sendiri, namun untuk kecamatan masih menggunakan vendor untuk jaringan Fonya dan sampai dengan tahun 2023 ini masih sewa. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian melakukan sewa jaringan Online/Internet/ Bandwidth internet dengan kecepatan 600 Mbps, sewa collocation untuk back up data center yang ada di nix data center jakarta dan batam. Untuk daerah yang sebelumnya tidak ada sinyal internet, di tahun 2023 ini telah dilakukan akses internet untuk desa blankspot dengan menggunakan jaringan Via Vsat.
2. Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan melakukan evaluasi SPBE diharapkan akan lebih meningkatkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE. Pelaksanaan koordinasi SPBE di lingkup Kabupaten Muara Enim dilakukan oleh Tim Koordinasi SPBE yang diatur dalam SK Bupati nomor 65/KPTS/Diskominfo/2023 tentang Tim Koordinasi SPBE.

Selain target diatas SPBE, target kegiatan penatalaksanaan dan pengawasan e-Government dengan melakukan monitoring terhadap menara telekomunikasi di Kabupaten Muara Enim untuk mendata kondisi tower yang ada, kegiatan ini juga melakukan monitoring terhadap cakupan luasnya sinyal yang ada di daerah-daerah Kabupaten Muara Enim .

- Sub kegiatan pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam rangka penerpaan sistem pemerintahan berbasis elektronik, penggunaan sistem informasi daerah/aplikasi merupakan unsur utama dalam penyelenggaraan SPBE, Dalam peningkatan pelayanan publik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah melakukan pengembangan website desa. Untuk menjalankan website desa telah ada program satu desa satu tenaga IT (Informasi Teknologi) sejak tahun 2021 kemudian para tenaga IT diberi template website serta didukung dengan hosting (tempat untuk menyimpan semua file dan data, sehingga bisa diakses oleh semua orang melalui internet) dan telah dilakukan pelatihan – pelatihan kepada para Tenaga IT agar bisa mengoperasikan website desa dengan baik.
- Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas

Smart Regency adalah bagaimana Pemerintah Kabupaten mewujudkan Regency atau Kabupaten Muara Enim menjadi kabupaten yang bisa melayani, memudahkan pelayanan, mendekatkan pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang saat ini sedang menjadi kebutuhan masyarakat untuk

informasi. Tujuannya adalah bagaimana bisa mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Gerakan Smart City merupakan program bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Bappenas dan Kantor Staf Kepresidenan. Gerakan tersebut bertujuan membimbing Kabupaten Muara Enim dalam menyusun Masterplan Smart City agar bisa lebih memaksimalkan pemanfaatan teknologi, baik dalam meningkatkan pelayanan masyarakat maupun mengakselerasikan potensi yang ada di Kabupaten Muara Enim

Konsep Smart Regency juga menerapkan lingkungan yang lebih lestari karena konsep penganturan limbah dan pengelolaan air yang lebih maju. Tujuan kota pintar juga bagi mana dapat mendatangkan wisatawan sebanyak mungkin, menarik investor agar berinvestasi di kota ini, kemudian menarik penghuni baru, bagi mana penghuni baru dari kalangan baik profesional, akademisi, dan usahawan bertempat tinggal di kota kita. Kesemuanya itu tolak ukurnya adalah kota tersebut memiliki daya tarik yang kuat.

Sebuah Kabupaten dapat dikatakan Smart Regency jika di dalamnya lengkap dengan infrastruktur dasar, juga memiliki system transportasi yang lebih efisien dan terintegrasi. sehingga meningkatkan mobilitas masyarakat. Konsep itu juga menciptakan kualitas hidup masyarakat yang terus meningkat, rumah dan bangunan yang hemat energi, bangunan ramah lingkungan dan memakai sumber energy terbarukan.

Dengan Smart City maka semua organisasi perangkat daerah yang memiliki sistem informasi bisa terintegrasi dalam satu sistem, sehingga siapa pun, kapan pun di mana pun bisa mendapatkan informasi, dikaitkan dengan informasi publik yang ada di Kabupaten Muara Enim ini.

Keberhasilan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE dan meningkatnya nilai indek SPBE sangat didukung dengan Kabupaten Muara Enim merupakan satu dari 100 Kabupaten atau Kota di Indonesia yang terpilih sebagai *pilot project* dalam program *smart city* atau *smart regency*, dan juga telah membangun infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK yang terdiri dari :

- Layanan internet pemerintah terpusat
- Pusat data (data center) terintegrasi

- Pembangunan jaringan FO untuk keamanan data
 - Muara Enim Command Center atau MECC
- Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah, untuk meningkatkan konektivitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) saat ini Kabupaten Muara Enim sudah menerapkan 100% sambungan internet dengan menggunakan Fiber optik (FO) ke seluruh Perangkat Daerah termasuk 22 Kecamatan di Muara Enim sudah terhubung kabel fiber optik yang jauh lebih efisien. Untuk jaringan internet dalam kota yang melayani internet ke setiap OPD dibangun secara mandiri atau menggunakan kabel sendiri, namun untuk kecamatan masih menggunakan vendor untuk jaringan FO-nya dan sampai dengan tahun 2023 ini masih sewa. Untuk meningkatkan infrastruktur telah dilakukan pemeliharaan terhadap CCTV dan pemeliharaan terhadap infrastruktur Fiber Optik.

Persentase informasi publik yang tersedia dan diumumkan sesuai UU No.14 tahun 2008 tentang KIP

1. Monitoring Opini Aspirasi Publik

Pembangunan Pengelolaan Sistem Pelayanan Informasi dan Pengaduan masyarakat (SPIPM) adalah sistem yang bertujuan untuk menampung keluhan / pengaduan dari masyarakat mengenai kinerja pemerintahan dan mengenai pembangunan daerah dalam Kabupaten Muara Enim. Saat ini sudah ada aplikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat karena termasuk aplikasi Layanan Umum yaitu aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (LAPOR SP4N), melalui aplikasi ini masyarakat bisa menyampaikan laporan, keluhan ataupun pengaduan yang bisa ditindaklanjuti secara cepat dan tepat dengan satu pintu melalui LAPOR SP4N sehingga masyarakat merasakan kehadiran pemerintah ditengah-tengah mereka. Pada tahun lalu mendapatkan penghargaan dari Keme PAN-RB berupa pengelola pengaduan pelayanan publik terbaik se-Indonesia untuk kategori Pemerintah Daerah atau mendapatkan piala Anggakara Bhirawa. Indikator dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen fasilitasi pengaduan/keluhan

masyarakat yang diterima dan ditindaklanjuti tepat waktu. Pada tahun 2023, ditargetkan sebanyak 1 dokumen fasilitasi pengaduan/keluhan masyarakat yang diterima dan ditindaklanjuti tepat waktu dan terealisasi sebanyak 1 dokumen dokumen fasilitasi pengaduan/keluhan masyarakat yang diterima dan ditindaklanjuti tepat waktu.

2. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik

Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik berisikan kegiatan tentang kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui beberapa media antara lain :

a. Media Massa

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka diseminasi informasi publik melalui media massa seperti :

- Majalah

Penyebarluasan informasi melalui majalah yaitu majalah yang diterbitkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sendiri yaitu majalah L@ras. Majalah L@ras merupakan majalah yang memberikan informasi tentang Hasil pembangunan daerah Kabupaten Muara Enim dan informasi mengenai pemerintahan daerah Kabupaten Muara Enim, ditampilkan juga ulasan mengenai berbagai aktifitas Bupati, Wakil Bupati, Sekda maupun organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka melaksanakan program-program pembangunan maupun kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. Pada tahun 2022 ini di cetak sebanyak 600 buku untuk dipublikasikan.

b. Media Baru

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka diseminasi informasi publik melalui media baru seperti :

- Website pemerintah Kab.Muara Enim (<http://muaraenimkab.go.id>)
- Facebook Diskominfo Muara Enim
- Instagram Diskominfo Muara Enim
- Youtube
- Twitter
- Aplikasi Muara Enim Centre (MANCE)
- Website PPID : ppid.muaraenimkab.go.id

c. Media Luar Ruang

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka diseminasi informasi publik melalui media luar ruang seperti :

- Billboard

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka diseminasi informasi publik melalui billboard, pada tahun 2023 ini di cetak sebanyak 132 buah untuk dipublikasikan.

- Spanduk

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka diseminasi informasi publik melalui spanduk, pada tahun 2023 ini di cetak sebanyak 303 buah untuk dipublikasikan.

- Baliho

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka diseminasi informasi publik melalui baliho, pada tahun 2023 ini di cetak sebanyak 132 buah untuk dipublikasikan.

- Leaflet

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka diseminasi informasi publik melalui leaflet, pada tahun 2023 ini di cetak sebanyak 501 Lembar untuk dipublikasikan.

3. Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Sub Kegiatan pengelolaan media komunikasi publik menyangkut kegiatan :

a. Talkshow radio

Target jumlah siaran radio / talkshow di tahun 2023 adalah 30 kali, sedangkan realisasi yang dicapai akhir tahun 2023 adalah 30 kali, Kegiatan ini berupa talkshow dan siaran tentang berita informasi hasil pembangunan daerah Kabupaten Muara Enim. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan melalui streaming radio suara muara enim dan bekerjasama dengan radio serasan Muara Enim melalui siaran .ulang. LPPL Radio Suara Muara Enim merupakan media atau sarana yang menjadi penghubung bagi Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan masyarakat terkait dengan penyedia informasi yang sehat, berimbang, edukatif, mencerdaskan dan mencerahkan dengan mata acara sebagai berikut :

- Berita

- Penerangan / Informasi

- Pendidikan dan kebudayaan
- Agama
- Hiburan dan musik
- Acara Penunjang / layanan masyarakat

4. Pelayanan Informasi Publik

Sub Kegiatan pelayanan informasi publik berisikan kegiatan mengenai PPID. Sesuai dengan amanat undang-undang menyebutkan perlu ada lembaga masyarakat yang mengakses keterbukaan informasi publik maka ada lembaga yang bernama Komisi Informasi Publik (KIP) yang berada di Provinsi untuk di Kabupaten bernama Badan Publik. Di Badan Publik nama organisasinya Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang keanggotaannya seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) PPID berfungsi sebagai wadah penyedia informasi dan dokumentasi dibutuhkan masyarakat, dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih muda dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim. Jadi PPID utama ada di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim sedangkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah dalam Kabupaten Muara Enim adalah PPID Pembantu.

Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik meliputi proses pengumpulan penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi. PPID adalah pejabat yang diangkat oleh pimpinan tertinggi badan publik melalui Surat Keputusan (SK). PPID bertanggung jawab kepada atasan langsung PPID. Atasan PPID merupakan penentu pengambilan kebijakan apabila muncul masalah dalam pengelolaan dan pelaksanaan layanan informasi termasuk dalam menentukan informasi yang dikecualikan atau tidak. Dalam melaksanakan wewenangnya, atasan PPID berkoordinasi dan meminta masukan dari Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi. Indikator dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen layanan informasi publik. Pada tahun 2023 ditargetkan sebanyak 1 dokumen terealisasi sebanyak 1 dokumen tentang layanan informasi publik.

5. Layanan Hubungan Media

Sub kegiatan layanan hubungan media mengelola kegiatan media center yaitu pusat informasi dan komunikasi publik yang menjadi tempat untuk mengakses informasi, berkomunikasi dan mendapatkan layanan sosial ekonomi dengan menggunakan sarana teknologi informasi dan komunikasi berupa komputer, scanner, printer dan koneksi internet. Media center ini terletak di berbagai daerah provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia. Harapannya, di seluruh provinsi, kota/kabupaten akan memiliki satu media center

Selain itu media center juga dapat menjadi jembatan penghubung informasi dan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, pemerintah dengan perangkat kerjanya, serta komunikasi dan informasi antar masyarakat. Konsep awal Media Center yang dulunya merupakan tempat mengakses informasi bagi wartawan, kini telah berubah menjadi tempat mengakses informasi dan berkomunikasi bagi masyarakat, baik pelajar, pekerja, masyarakat dari berbagai profesi, termasuk wartawan. Pada tahun 2023 kegiatan ini ditarget 1 berkas dokumen informasi aktual yang diupdate melalui media center terealisasi sebanyak 1 berkas dokumen informasi aktual yang diupdate melalui media center terealisasi.

6. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan

Indikator dari kegiatan penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan adalah jumlah media penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui media massa.

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka diseminasi informasi publik melalui media :

a. Media massa

- Surat kabar

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka diseminasi informasi publik melalui surat kabar yang kerjasama dengan pihak media yaitu melalui surat kabar harian dan surat kabar mingguan, tahun 2023 penyebarluasan informasi melalui surat kabar baik harian maupun mingguan dilaksanakan dengan 279 kali tayang.

- TV

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka diseminasi informasi publik melalui TV yang kerjasama dengan pihak media yaitu TVRI, PalTV, TV One, untuk tahun 2023 dilaksanakan dengan 74 kali tayang.

b. Media Online

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka diseminasi informasi publik melalui media online yang kerjasama dengan pihak media online, untuk tahun 2023 dilaksanakan dengan 259 kali tayang.

c. Media Baru

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka diseminasi informasi publik melalui media baru seperti :

- Website pemerintah Kab.Muara Enim (<http://muaraenimkab.go.id>)
- Facebook Diskominfo Muara Enim
- Instagram Diskominfo Muara Enim
- Youtube
- Twitter
- Aplikasi Muara Enim Centre (MANCE)
- Website PPID : ppid.muaraenimkab.go.id

Kebijakan / Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut.

Kebijakan atau tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mendukung Indikator Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan rencana strategis tersebut. Adapun Kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dan memberikan argumentasi atas program/kegiatan tersebut sehingga nantinya dapat dianggarkan pelaksanaan program/kegiatan yang mengarah pada pengembangan pelayanan berbasis

teknologi informasi, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kominfo Kabupaten Muara Enim

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim dibentuk pada tahun 2016 melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 tahun 2022 dan Peraturan Bupati Bupati Muara Enim Nomor 18 Tahun 2023 tentang susunan, kedudukan, tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik menyelenggarakan tiga urusan wajib non pelayanan dasar yang menjadi kewenangan berdasarkan UU no. 23 tahun 2008, yakni:

1. Urusan Komunikasi dan Informatika dengan sub urusan yang menjadi kewenangan daerah:
 - a. Pengelolaan Informasi Publik
 - b. Penerapan Layanan e-Government
 - c. Pengelolaan Domain dan sub domain di Kabupaten Muara Enim
2. Urusan Persandian dengan sub urusan menjadi kewenangan daerah, yakni:
 - a. Persandian untuk pengamanan Informasi daerah Kabupaten
3. Urusan Statistik dengan sub urusan kewenangan daerah yakni:
 - a. Pengelolaan statistik sektoral

.Capaian kinerja tersebut dapat dijabarkan pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Muara Enim

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Renstra SKPD		Realisasi Capaian Tahun ke- Tahun n-1	proyeksi		catatan analisis
				Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn + n)		Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn + n)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(9)	(10)
1	Indeks SPBE	-	-	3,00	3,00		3,00	3,00	
2	Persentase informasi Publik yang tersedia dan diumumkan sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP			90%	90%		90%	90%	
3	Persentase perangkat daerah yang menerapkan kebijakan internal SPBE implementasi kebijakan tata kelola			100%	100%		100%	100%	
4	Persentase perangkat daerah yang menerapkan kebijakan internal SPBE implementasi kebijakan manajemen SPBE			100%	100%		100%	100%	
5	Persentase OPD yang melaksanakan perencanaan kegiatan mempedomani peta rencana SPBE			100%	100%		100%	100%	
6	Persentase perangkat daerah dan area publik yang terkoneksi jaringan internet			100%	100%		100%	100%	
7	Persentase OPD yang terhubung jaringan FO			100%	100%		100%	100%	
8	Meningkatnya bandwidth jaringan intra pemerintah			15 Mbps	15 Mbps		15 Mbps	15 Mbps	
9	Jumlah Area publik yang tersedia internet gratis			33 titik	58 titik		58 titik	58 titik	

10	Kapasitas server dan bandwidth			5 T dan 50 MBPS	5 T dan 50 MBPS		5 T dan 50 MBPS	5 T dan 50 MBPS	
11	Persentase OPD yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah			100%	100%		100%	100%	
12	Jumlah desa pariwisata yang terpasang internet v-sat			5 Desa	5 Desa		5 Desa	5 Desa	
13	Persentase desa blankspot yang tersedia internet gratis			100%	100%		100%	100%	
14	Jumlah layanan aplikasi yang terintegrasi ke aplikasi mance			2 Aplikasi	2 Aplikasi		2 Aplikasi	2 Aplikasi	
15	Persentase OPD yang memanfaatkan layanan pusat data			73,70%	73,70%		73,70%	73,70%	
16	Tingkat Akses Media Komunikasi Publik			Sedang	Sedang		Sedang	Sedang	
17	Persentase Media Komunikasi Publik yang dimanfaatkan di Kab. MuaraEnim			100%	100%		100%	100%	
18	Persentase kerjasama media massa			100%	100%		100%	100%	
19	Persentase jenis media komunikasi publik milik Pemda yang dikelola	-	-	100%	100%		100%	100%	
20	Jumlah media cetak,media Daring dan Media Penyiaran yang digunakan dalam diseminasi	-	-	12100%	12100%		12100%	12100%	
21	Jumlah Penganjur Website			250.000	250.000		250.000	250.000	
22	Jumlah jenis media sosial yang digunakan dalam diseminasi informasi			3 (youtube,instagram, facebook)	3 (youtube,instagram, facebook)		3 (youtube,instagram, facebook)	3 (youtube,instagram, facebook)	

23	Jumlah jenis media luar ruang yang digunakan dalam diseminasi			4 (Videotrone, Baliho, Spanduk, Leaflet)	4 (Videotrone, Baliho, Spanduk, Leaflet)		4 (Videotrone, Baliho, Spanduk, Leaflet)	4 (Videotrone, Baliho, Spanduk, Leaflet)	
24	Persentase media komunikasi public yang berbasis TI yang digunakan			100%	100%		100%	100%	
25	Persentase lembaga komunikasi publik yang menjalankan tugasnya			100%	100%		100%	100%	
26	Cakupan penyiaran radio			40 KM	40 KM		40 KM	40 KM	
27	Jumlah media tatap muka/interpersonal yang digunakan dalam diseminasi informasi			4	4		4	4	
28	Persentase KIM yang telah dibentuk			25%	25%		25%	25%	
29	Persentase sarana layanan informasi dan pengaduan terhadap pelayanan publik			100%	100%		100%	100%	
30	Jumlah inovasi dalam layanan informasi dan pengaduan terhadap pelayanan publik			4 (Lapor on the road, call center pengaduan, layanan media luar ruang, lapor go medsos)	4 (Lapor on the road, call center pengaduan, layanan media luar ruang, lapor go medsos)		4 (Lapor on the road, call center pengaduan, layanan media luar ruang, lapor go medsos)	4 (Lapor on the road, call center pengaduan, layanan media luar ruang, lapor go medsos)	
31	Persentase informasi, laporan dan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti sesuai standar			100%	100%		100%	100%	
32	Persentase Publikasi Opini dan Aspirasi publik			80%	80%		80%	80%	
33	Persentase SDM yang memiliki kemampuan dalam mengelola statistik			100%	100%		100%	100%	
34	Persentase Ketersediaan data statistik sektoral			100%	100%		100%	100%	

35	Rata-rata waktu menanggapi laporan pengaduan			3 Hari	3 Hari		3 Hari	3 Hari	
36	Persentase Layanan SPBE yang berpedoman pada manajemen keamanan informasi SPBE			100%	100%		100%	100%	
37	Jumlah layanan TIK yang telah menggunakan standar TIK			5 (BeSign, Panter, Srikandi, Sismiop, Sanapati)	5 (BeSign, Panter, Srikandi, Sismiop, Sanapati)		5 (BeSign, Panter, Srikandi, Sismiop, Sanapati)	5 (BeSign, Panter, Srikandi, Sismiop, Sanapati)	
38	Jumlah OPD yang melaksanakan kebijakan sertifikat elektronik			58 OPD	58 OPD		58 OPD	58 OPD	
	Jumlah OPD yang menerapkan jaring komunikasi sandi (JKS)			9 OPD	17 OPD		17 OPD	17 OPD	
	Jumlah ruangan yang dilaksanakan kontra penginderaan			9 Ruangan	9 Ruangan		9 Ruangan	9 Ruangan	
39	Cakupan layanan administrasi perkantoran			100%	100%		100%	100%	
40	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur			100%	100%		100%	100%	
41	Persentase aparatur yang mempunyai kompetensi dibidangnya			100%	100%		100%	100%	
42	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan			100%	100%		100%	100%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim

Permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

- Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan unsur Lembaga Teknis Daerah di bidang komunikasi dan informatika.
- Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1. Tugas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

2. Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Untuk melaksanakan tugas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informasi, bidang statistik dan bidang persandian.
2. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informasi, bidang statistik dan bidang persandian.
3. Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan urusan di di bidang komunikasi dan informasi, bidang statistik dan bidang persandian.
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informasi, bidang statistik dan bidang persandian
5. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan, umum dan keuangan.

6. Pelaksanaan pengawasan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang komunikasi dan informasi, bidang statistik dan bidang persandian;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaannya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian di bagi dalam 5 bidang yakni :

1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian serta pengelolaan keuangan dan umum yang meliputi kegiatan kepegawaian, tata naskah dinas, kearsipan, pengadaan perlengkapan, rumah tangga dan humas serta perjalanan dinas di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
2. Bidang Pengelolaan Data Informasi Publik dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Pengelolaan Data Informasi Publik dan Statistik.
3. Bidang Penyelenggaraan E-Government mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian di bidang pengelolaan infrastruktur E-Government.
4. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian di bidang pengelolaan komunikasi publik.
5. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang Persandian dan Keamanan Informasi.

Tiap bidang pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian juga memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Sekretariat sebagai berikut :
 - a. Penyiapan bahan koordinasi, pengolahan data dan penyusunan program kerja di lingkungan dinas;
 - b. Memverifikasi bahan, pengolahan data dan penyusunan program kerja di lingkungan dinas;

- c. Pengkoordinasian penatausahaan keuangan di lingkungan dinas;
 - d. Pengkoordinasian pengelolaan perlengkapan administrasi kepegawaian;
 - e. Pengkoordinasian pengelolaan perlengkapan, tata naskah dinas dan arsip, rumah tangga, kehumasan dan perjalanan dinas;
 - f. Pengevaluasian bahan penyusunan laporan dan pelaksanaan program;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
2. Fungsi Bidang Pengelolaan Data Informasi Publik dan Statistik
- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja Bidang Pengelolaan Data Informasi Publik dan Statistik;
 - b. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan data informasi publik dan statistik, pengendalian, pengendalian dan pengawasan informasi publik, serta penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di kabupaten;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan data informasi publik dan statistik, pengendalian, serta penyediaan konten lintas sektoral;
 - d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan kebijakan di bidang pengelolaan data informasi publik dan statistik, pengendalian, serta penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Kabupaten;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan data informasi publik dan statistik, serta penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di kabupaten;
 - f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan data informasi publik dan statistik, serta penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di kabupaten;

- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi.
3. Fungsi Bidang Penyelenggaraan e-Government
- a. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kerja Bidang Penyelenggaraan E-Government;
 - b. Merumuskan kebijakan di bidang pengelolaan infrastruktur E-Government meliputi infrastruktur TIK, pengembangan aplikasi, dan tata kelola E-Government;
 - c. Melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan infrastruktur E-Government meliputi infrastruktur TIK, pengembangan aplikasi, dan tata kelola E-Government;
 - d. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan infrastruktur E-Government meliputi infrastruktur TIK, pengembangan aplikasi, dan tata kelola E-Government;
 - e. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan infrastruktur E-Government meliputi infrastruktur TIK, pengembangan aplikasi, dan tata kelola E-Government;
 - f. Memantau, mengevaluasi, dan melaporkan Bidang Pengelolaan Infrastruktur E-Government meliputi Infrastruktur TIK, Pengembangan Aplikasi, dan Tata Kelola E-Government;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
4. Fungsi Bidang Persandian dan Keamanan Informasi sebagai berikut :
- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja Bidang Persandian dan Keamanan Informasi ;
 - b. perumusan kebijakan di bidang Persandian dan Keamanan Informasi meliputi pengawasan dan evaluasi persandian, tata kelola persandian serta keamanan informasi;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang Persandian dan Keamanan Informasi meliputi pengawasan dan evaluasi persandian, tata kelola persandian serta keamanan informasi;

- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Persandian dan Keamanan Informasi meliputi pengawasan dan evaluasi persandian, tata kelola persandian serta keamanan informasi;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Persandian dan Keamanan Informasi meliputi pengawasan dan evaluasi persandian, tata kelola persandian serta keamanan informasi;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
 - g. pemantauan, mengevaluasi, dan melaporkan di bidang Persandian dan Keamanan Informasi meliputi pengawasan dan evaluasi persandian, tata kelola persandian serta keamanan informasi;
5. Fungsi Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik sebagai berikut :
- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan komunikasi publik meliputi pengelolaan media komunikasi publik, kemitraan komunikasi publik, dan pengelolaan kelompok komunikasi publik;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan komunikasi publik meliputi pengelolaan media komunikasi publik, kemitraan komunikasi publik, dan pengelolaan kelompok komunikasi publik;
 - d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan komunikasi publik meliputi pengelolaan media komunikasi publik, kemitraan komunikasi publik, dan pengelolaan kelompok komunikasi publik;
 - e. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan komunikasi publik meliputi pengelolaan media komunikasi publik, kemitraan komunikasi publik, dan pengelolaan kelompok komunikasi publik;

- f. pemantauan, mengevaluasi, dan melaporkan di bidang pengelolaan komunikasi publik meliputi pengelolaan media komunikasi publik, kemitraan komunikasi publik, dan pengelolaan kelompok komunikasi publik;

3. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan penggabungan dari Dinas Informasi dan Komunikasi, Dinas Pengelolaan Data & Arsip dan Sub Dinas Pos dan Telekomunikasi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim, diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor : 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim, dua Dinas dan satu subdin tersebut di atas dilebur sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2016 tanggal 14 Oktober 2016 yang telah diubah dengan Peraturan Kepala Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang pembentukan susunan perangkat daerah dan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 30 tahun 2016 terakhir telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2022 tentang susunan, kedudukan, tugas fungsi dan struktur organisasi dinas Komunikasi dan Informatika. dengan adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi mulai diterapkan sebagai tindak lanjut terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil dalam ayat 1 pasal 350A dalam hal diperlukan penataan birokrasi, penyesuaian jabatan kedalam jabatan fungsional dapat dilakukan penyetaraan jabatan. Penyetaraan dimaksud ditetapkan dengan peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17 tahun 2021 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional, dengan struktur organisasinya terdiri dari :

- A. Kepala Dinas
- B. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian

- b. Perencana Muda Sub-koordinator Perencanaan
 - c. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda Sub-koordinator Keuangan
- C. Bidang Pengelolaan Data Informasi Publik dan Statistik, membawahi :
 - a. Pranata Komputer Muda Sub-koordinator Pengelolaan Opini Publik
 - b. Pranata Komputer Muda Sub-koordinator Layanan Informasi Publik
 - c. Statistisi Muda Sub-koordinator Pengelolaan Data dan Statistik
- D. Bidang Penyelenggaraan E-Government, membawahi :
 - a. Pranata Komputer Muda Sub-koordinator Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
 - b. Pranata Komputer Muda Sub-koordinator Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi
 - c. Pranata Komputer Muda Sub-koordinator Tata Kelola E-Government
- E. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi , membawahi :
 - a. Sandiman Muda Sub-koordinator Pengawasan dan Evaluasi Persandian
 - b. Sandiman Muda Sub-koordinator Tata Kelola Persandian
 - c. Manggala Informatika Muda Sub-Koordinator Keamanan Informasi
- F. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, membawahi :
 - a. Pranata hubungan masyarakat Muda Sub-koordinator Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - b. Pranata Siaran Muda Sub-koordinator Kemitraan Komunikasi Publik
 - c. Pranata Hubungan Masyarakat Muda Sub-koordinator Pengelolaan Kelompok Komunikasi Publik
- G. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- H. Kelompok Jabatan Fungsional

4. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

1. Kepegawaian

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi tersebut, jumlah pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim tahun 2024 dengan perincian :

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim Menurut Distribusi Perbidang, Status, Pangkat dan Golongan

Status Kepegawaian/Pangkat	Golongan/Ruang	Kepala	Unit kerja di lingkungan Dinas Kominfo				Bidang PKP	Total
			Sekretariat	Bidang PDIPS	Bidang E-Gov	Persandian dan Keamanan Informasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Pegawai Negeri Sipil (PNS)								
1. Pembina Utama Muda	IV/c	1						1
2. Pembina Tk I	IV/b	-	-	-	-	-	-	-
2. Pembina	IV/a	-	-	1	-	1	-	2
3. Penata TK I	III/d	-	2	2	2	2	1	9
4. Penata	III/c	-	2	1	1	-	3	7
5. Penata Muda TK I	III/b	-	1	1	1	1	-	4
6. Penata Muda	III/a	-	-	1	1	-	1	3
7. Pengatur TK I	II/d	-	1	-	-	-	-	-
8. Pengatur	II/c	-	1	-	1	-	-	2
9. Pengatur Muda TK I	II/b	-	-	-	-	-	-	-
10. Pengatur Muda	II/a	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		-	-	-	-	-	-	
B. Honorarium Daerah							-	
JUMLAH		1	7	6	6	4	5	29

Tabel 2.4.
Susunan Kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim Menurut Tingkat Pendidikan.

Pendidikan	Kepal a	Unit kerja di lingkungan Dinas Kominfo					KET.
		Sekreta riat	Bidan g PDIPS	Bida ng E- Gov	Persandian dan Keamanan Informasi	Bidang PKP	
A.Pegawai Negeri Sipil (PNS)							
1. S-2	1	2	1	1	1	-	6
2. S-1	-	3	5	3	3	5	19
3. D-3	-	1	-	1	-	-	2
4. SLTA / Sederajat	-	1	-	1	-	-	2
5. SLTP / Sederajat	-	-	-	-	-	-	-
6. SD / Sederajat	-	-	-	-	-	-	-
B. CPNS							-
1. S-1	-	-	-	-	-	-	-
2. D-3	-	-	-	-	-	-	-
3. SLTA / Sederajat	-	-	-	-	-	-	-
4. SLTP / Sederajat	-	-	-	-	-	-	-
5. SD / Sederajat	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	1	7	6	6	4	5	29

2. Perlengkapan

Jumlah perlengkapan Dinas yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim yang didalamnya mencakup beberapa barang inventaris dapat dilihat pada tabel 2.5.

Tabel 2.5
Daftar Sarana Prasarana
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Muara Enim

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	TANAH		
	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	139 m2	Baik
2	PERALATAN DAN MESIN		
	Komputer		
	- P.C Unit	43	Baik
	- Lap Top	18	Baik
	- Note Book	1	Baik
	- Tablet PC	1	Baik
	- Personal Komputer lainnya	22	Baik
	- Hard Disk	18	Baik
	- Peralatan Minikomputer lainnya	1	Baik
	- Printer (Peralatan Personal Komputer)	26	Baik
	- Scanner (Peralatan Personal Komputer)	4	Baik
	- Peralatan Personal Komputer lainnya	2	Baik
	- Server	10	Baik
	- Router	117	Baik
	- Hub	71	Baik
	- Modem	2	Baik
	- Repeater and Transciever	8	Baik
	- Kabel UTP	3	Baik
	- Switch	2	Baik
	- Acces Point	106	Baik
	- Peralatan Jaringan lainnya	61	Baik
	Alat Eksplorasi	2	Baik
	- Converter	2	Baik
	Alat Angkutan	19	Baik
	- Kendaraan dinas roda 4 Multi Purpose Vehicle (MPV)	2	Baik

	- Kendaraan dinas roda 4 Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	5	Baik
	- Sepeda Motor	12	Baik
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	9	Baik
	- Tripod	2	Baik
	- Spektrum Analyzer	1	Baik
	- Global Positioning System	3	Baik
	- Scanner (Universal Tester)	2	Baik
	- Termometer Standar	1	Baik
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	475	Baik
	- Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	1	Baik
	- Mesin Ketik Elektronik/Selektik	1	Baik
	- Mesin Hitung Elektronik/Calculator	4	Baik
	- Rak Besi	10	Baik
	- Filing Cabinet Besi	7	Baik
	- Brandkas	1	Baik
	- Lemari Kaca	1	Baik
	- Alat Penyimpanan Kantor lainnya	16	Baik
	- CCTV - Camera Control Television System	34	Baik
	- Alat Penghancur Kertas	6	Baik
	- Alat Pemotong Kertas	2	Baik
	- Alat Pengaman / Sinyal	2	Baik
	- Penangkal Petir	1	Baik
	- LCD Projector/Infocus	3	Baik
	- Pintu Elektrik (yang Memakai Akses)	2	Baik
	- Papan Nama Instansi	2	Baik
	- Alat Kantor Lainnya	52	Baik
	- Meja Kerja Besi/Metal	5	Baik
	- Meja Kerja Kayu	3	Baik
	- Kursi Besi/Metal	34	Baik
	- Meja Resepsionis	1	Baik
	- Meja Bundar	1	Baik
	- Meja Biro	8	Baik
	- Kursi Rapat	63	Baik
	- Kursi Putar	14	Baik
	- Meja Komputer	22	Baik

	- Sofa	2	Baik
	- Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	Baik
	- A.C. Sentral	1	Baik
	- A.C. Split	20	Baik
	- Alat Pendingin lainnya	1	Baik
	- Kompor Gas (Alat Dapur)	1	Baik
	- Tabung Gas	1	Baik
	- Rak Piring Alumunium	1	Baik
	- Mixer	1	Baik
	- Televisi	11	Baik
	- Video Cassette	1	Baik
	- Amplifier	1	Baik
	- Loudspeaker	2	Baik
	- Sound System	1	Baik
	- Wireless	11	Baik
	- Microphone	7	Baik
	- Microphone Floor Stand	4	Baik
	- Unit Power Supply	10	Baik
	- Stabilisator	5	Baik
	- Camera Video	3	Baik
	- Tangga Aluminium	3	Baik
	- Dispenser	2	Baik
	- Handy Cam	4	Baik
	- DVD Player	2	Baik
	- Alat Rumah Tangga Lain-lain	18	Baik
	- Alat Pemadam/Portable	2	Baik
	- Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Baik
	- Meja Kerja Pejabat Eselon III	5	Baik
	- Meja Kerja Pejabat Eselon IV	10	Baik
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Baik
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	Baik
	- Kursi Kerja Pejabat lainnya	23	Baik
	- Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	18	Baik
	- Lemari Arsip Pejabat lainnya	4	Baik
	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	246	Baik
	- Audio Mixing Portable	1	Baik

	- Disc Record Player	1	Baik
	- Microphone/Wireless MIC	1	Baik
	- Uninterruptible Power Supply (UPS)	9	Baik
	- peralatan studio audio lainnya (dst)	15	Baik
	- Camera Electronic	67	Baik
	- Video Processor	1	Baik
	- Tripod Camera	2	Baik
	- Lensa Kamera	2	Baik
	- Layar Film/Projector	6	Baik
	- Alat Studio Video Lainnya	3	Baik
	- Alat Studio Lainnya	19	Baik
	- Handy Talky (HT)	3	Baik
	- Facsimile	4	Baik
	- Telopon digital	63	Baik
	- Alat komunikasi radio HF/FM	39	Baik
	- Mainframe	6	Baik
	- Antena UHF	1	Baik
	- Genzet	3	Baik
	Alat Laboratorium		
	- Digital indikator	1	Baik
	- tripod	1	Baik
	- Pinn Filter	1	Baik
	- Converter	2	Baik
	- Transmitter	1	Baik
3	GEDUNG DAN BANGUNAN		
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen Jln. Bambang Utoyo No.20 Muara Enim	139	Baik
	- Taman lainnya Jln. Bambang Utoyo No.20 Muara Enim	133	Baik
	- Bangunan Menara Telekomunikasi Lain-lain Jln. Lintas Sumatera Ujan Mas	50	Baik
	- Pagar Permanen Jln. Bambang Utoyo No.20 Muara Enim	756	Baik
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		
	- Instalasi Penangkal Petir Manual Kantor Camat Gunung Megang		Baik
	- Peralatan Instalasi listrik kantor kominfo jl. Bambang utoro		Baik
	- Jaringan Induk Distribusi Lain-Lain kantor Camat		Baik

	Benakat		
	- Jaringan Induk Distribusi Lain-Lain Kecamatan Lawang kidul		Baik
	- Jaringan Induk Distribusi Lain-Lain kantor Camat muara enim		Baik
	- Jaringan Induk Distribusi Lain-Lain kantor DPRD Muara enim		Baik
	- Jaringan Induk Distribusi Lain-lain Kantor Inspektorat Kab. Muara Enim		Baik
	- Jaringan Induk Distribusi Lain-lain Sekretariat ULP Kelurahan Tungkal		Baik
	- Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas keci kecamatan gelumbang		Baik
	- Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas kecil kecamatan Kelekar		Baik
	- Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas kecil kecamatan Lembak		Baik
	- Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas kecil kecamatan lubai		Baik
	- Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas kecamatan Rambang		Baik
	- Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas kecil Kecamatan Rambang Dangku		Baik
	- Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas kecil Kecamatan Sungai Rotan		Baik
	- Jaringan Telepon Di atas Tanah Lain-lain		Baik
	- Jaringan Telepon Dibawah Tanah Kapasitas		Baik
5	Aset Lainnya		
	ASET TIDAK BERWUJUD		
	- Software	8	Baik
	Peralatan Studio Video dan Film Lain-lain		
	- Infocus		Rusak Berat
	- Proyektor		Rusak Berat

➤ Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Hal lain yang dianggap penting pada SKPD Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim terkait tugas, pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai unsur perencanaan adalah masih kurangnya Sumber daya Manusia yang memiliki jenjang pendidikan Sarjana dan Pasca Sarjana di bidang perencanaan yang notabene sangat diperlukan dalam rangka

pemikiran-pemikiran yang visioner dan mampu menganalisis kondisi yang ada menjadi kekuatan dalam perencanaan pembangunan daerah saat ini dan masa mendatang. Serta sumber daya manusia yang berbasis pendidikan Teknologi Informasi (IT).

Disamping itu Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian juga masih relatif terbatas sarana dan prasarana penunjang kerja dan tenaga teknis bidang programmer dan tenaga jaringan, tenaga persandian guna menunjang pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi masing-masing.

➤ **Dampak nya Terhadap Pencapaian Visi Dan Misi Terhadap Capaian SPM**

Dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Komunikasi dan Informatika telah ditetapkan peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/per/m.kominfo/12/2010 tentang SPM bidang komunikasi dan informatika di kabupaten/kota. serta pasal 11 ayat (4) Undang Undang No 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan yang bersifat wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Berkaitan dengan pencapaian target indikator SPM bidang Komunikasi dan Informatika, maka perumusan kegiatan dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 supaya memperlihatkan hal-hal berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal, Standar Pelayanan Minimal bidang Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut :

Tabel 2.6
Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika.

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM
1	Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional melalui: a. Media massa: - Majalah - Radio - Televisi

		b. Media website (media online) n. Media tradisional seperti pertunjukan rakyat; d. Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya;
		e. Media luar ruang: - Buletin - Leaflet - Booklet - Brosur - Spanduk - Baliho
2	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

➤ Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan

Pengembangan komunikasi dan informasi yang dibangun adalah, pada pemangku kepentingan di tingkat biroksi serta masyarakat sebagai penerima pelayanan. Peluang ini cukup besar dan resptitif karena masyarakat juga menghaapkan komunikasi dan informasi dalam melaksanakan program pembangunan. Tingkat penyebaran informasi yang dilakukan salah satunya adalah dngan metode pendekatan yang efektif seperti dialog interaktif, komunikasi keliling, media elektronik keliling, media elektronik, serta melalui seni tradisional yang masih digandrungi oleh masyarakat.

Untuk mengembangkan peluang tersebut, maka media teknologi juga menjadi hal yang harus diperhatikan. Dalam Era sekarang, tidaklah dapat dipungkiri bahwa pemanfaatan IT telah menyentuh sebagian besar masyarakat dunia tidak terkecuali masyarakat pedesaan sabagai kaum marginal. Sebagai pendukung pembangunan, jelas bahwa IT sudah familiar pada sebagian masyarakat. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan komunikasi dan informasi antara lain sebagai berikut:

1. Belum meratanya penyebaran informasi pada seluruh lapisan masyarakat dan kondisi ini akan mendorong masyarakat bersikap apatis terhadap pelaksanaan pembangunan daerah.
2. Belum optimalnya pengelolaan kelompok informasi masyarakat (KIM) yang eksistensinya berperan penting sebagai wadah diseminasi informasi.
3. Belum Optimalnya pelaksanaan keterbukaan informasi Public sesuai dengan Undang-undang KIP.
4. Terjadinya kesenjangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat disebabkan kurang optimalnya fasilitas teknologi informasi.
5. Terbatasnya kapasitas, jangkauan, kualitas sarana dan prasarana TIK

Dengan memperhatikan arah kecenderungan perkembangan organisasi dan penerapan desentralisasi dan otonomi daerah, maka situasi masa depan yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Meratanya penyebaran informasi pada seluruh lapisan masyarakat melalui diseminasi informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemberdayaan dan penguatan kelembagaan KIM dan lembaga pelayanan informasi pada setiap SKPD sebagai wadah distribusi dan diseminasi informasi pada masyarakat.
3. Terlaksananya pengelolaan keterbukaan informasi publik pada setiap badan publik di seluruh kabupaten Muara Enim.
4. Meningkatnya pengembangan jaringan IT yang mendukung penyebarluasan informasi, meningkatkan kinerja dan pelayanan birokrasi.

➤ **Formulasi Isu-Isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategik untuk di tinjak lanjuti**

Teknologi informasi dan komunikasi menjajikan efisiensi, Kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang gombal dan transparasi. Oleh karena itu, dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintah yang good governance salah satu upayanya

adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang populer disebut *e-government*. pelaksanaan *e-government* yang telah diimplikasikan harus dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari internal pemerintahan, masyarakat dan pihak swasta. Isu strategi yang menjadi tantangan tugas pokok dan fungsi dinas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian kabupaten Muara Enim ke depan lebih menitikberatkan pada peran teknologi dalam hubungannya dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Melalui peran teknologi, maka tiga hal pilar penting dalam pembangunan reformasi yakni transparansi, akuntabilitas, dan efektifitas dapat tercapai. Dengan pendekatan ilmiah dan logis (teknoratik).

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim tahun 2025 disusun dengan mempedomani Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Muara Enim tahun 2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim tahun 2024-2026. Selain itu, penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim tahun 2025 juga mempedomani RPD Kabupaten Muara Enim tahun 2024-2026. Proses kesesuaian Penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim tahun 2025 terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Muara Enim tahun 2025. Penjelasan terhadap temuan – temuan setelah proses membandingkan dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan tidak terdapat dirancangan awal RKPD atau besaran kegiatan berbeda dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut.

Tabel 2.7
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025
Kabupaten Muara Enim

Nama SKPD : Dinas Komunikasi, Informatika, Stataistik dan Persandian

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2					Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar				31.556.984.664,00	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar				31.556.984.664,00
2	16	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	7.336.235.014,00	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	7.336.235.014,00
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan yang dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu	100%	60.521.200,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan yang dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu	100%	60.521.200,00
2	16	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	24.197.600	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	24.197.600

2	16	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	10.548.200	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	10.548.200
2	16	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	7.050.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	7.050.000
2	16	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	7.050.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	7.050.000
2	16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	5.337.300	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	5.337.300
2	16	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	6.338.100	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	6.338.100
1	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Muara Enim	Persentase Laporan Keuangan yang dapat diselesaikan dengan baik	100%	4.706.285.628,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Muara Enim	Persentase Laporan Keuangan yang dapat diselesaikan dengan baik	100%	4.706.285.628,00

							dan tepat waktu					dan tepat waktu		
1	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang	4.694.151.028	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang	4.694.151.028
1	16	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	6.322.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	6.322.500
1	16	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	5.812.100	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	5.812.100
2	16	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Cakupan layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100%	36.030.750,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Cakupan layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100%	36.030.750,00
2	16	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	36.030.750,00	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	36.030.750,00
2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat	100%	76.500.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat	100%	76.500.000,00

							Daerah					Daerah		
2	16	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	21 Orang	76.500.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	21 Orang	76.500.000,00
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Muara Enim	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	1.416.804.399,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	1.416.804.399,00
2	16	01	2.06	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	22.795.400	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	22.795.400
2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	228.027.500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	228.027.500
2	16	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	44.461.099	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	44.461.099
2	16	01	2.06	0004	Penyediaan bahan logistik kantor	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	147.874.300	Penyediaan bahan logistik kantor	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	147.874.300
2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	42.507.800	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	42.507.800

2	16	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	13.574.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	13.574.000
2	16	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	8.258.400	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	8.258.400
2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Muara Enim dan luar Kabupaten Muara Enim	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 laporan	909.305.900	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Muara Enim dan luar Kabupaten Muara Enim	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 laporan	909.305.900
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Muara Enim	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	10.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Muara Enim	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		10.000.000,00
2	16	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit Kendaraan Roda 2	-	Pengadaan Mebel	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit Kendaraan Roda 2	-
2	16	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	10.000.000	Pengadaan Mebel	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	10.000.000
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	300.884.750	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	300.884.750,00
2	16	01	2.08	0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	9.517.200	Penyediaan jasa surat menyurat	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	9.517.200

2	16	01	2.08	0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	171.007.550	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	171.007.550
2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	120.360.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	120.360.000
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase sarana dan prasarana barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara	100%	729.208.287	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase sarana dan prasarana barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara	100%	729.208.287,00
2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	314.998.287	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	314.998.287
2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	365.800.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	365.800.000
2	16	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Muara Enim	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Jenis	24.950.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Muara Enim	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Jenis	24.950.000

2	16	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Jenia	23.460.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Jenia	23.460.000
2	16				Urusan Pemerintahan Bidang komunikasi dan Informatika				23.347.254.050,00	Urusan Pemerintahan Bidang komunikasi dan Informatika				23.347.254.050,00
2	16	02			Program Informasi dan Komunikasi Publik		Persentase Informasi yang didiseminasikan dan dipublikasikan	100%	7.754.464.000,00	Program Informasi dan Komunikasi Publik		Persentase Informasi yang didiseminasikan dan dipublikasikan	100%	7.754.464.000,00
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah media komunikasi publik yang dikelola	6 Jenis Media (Media cetak, Media Penyiaran, Media Daring, Media Sosial, Media Luar Ruang dan Media Tatap Muka)	7.754.464.000,00	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah media komunikasi publik yang dikelola	6 Jenis Media (Media cetak, Media Penyiaran, Media Daring, Media Sosial, Media Luar Ruang dan Media Tatap Muka)	7.754.464.000,00

2	16	02	2.01	0014	Relasi Media	Kabupaten Muara Enim	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	612 Laporan	5.714.554.300	Relasi Media	Kabupaten Muara Enim	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	612 Laporan	5.714.554.300
2	16	02	2.01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	50 Kelompok	138.163.900	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	50 Kelompok	138.163.900
2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik	Kabupaten Muara Enim	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	10 Permohonan	108.486.800	Pelayanan Informasi Publik	Kabupaten Muara Enim	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	10 Permohonan	108.486.800
2	16	02	2.01	0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Kabupaten Muara Enim	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	52 Rekomendasi	256.597.300	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Kabupaten Muara Enim	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	52 Rekomendasi	256.597.300
2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kabupaten Muara Enim	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	12 Media	531.268.200	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kabupaten Muara Enim	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	12 Media	531.268.200

	16	02	2.01	0023	Penyusunan Konten	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Konten Informasi Publik	100 Konten	1.005.393.500	Penyusunan Konten	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Konten Informasi Publik	100 Konten	1.005.393.500
2	16	03			Program Aplikasi Informatika		Persentase terlayannya kebutuhan aptika OPD	100%	15.592.790.050,00	Program Aplikasi Informatika		Persentase terlayannya kebutuhan aptika OPD	100%	15.592.790.050,00
2	16	03	2.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		- Persentase OPD yang terhubung jaringan VPN	100%	15.592.790.050,00	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			100%	15.592.790.050,00
2	16	03	2.02	0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Kabupaten Muara Enim	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1 Laporan	17.331.600	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Kabupaten Muara Enim dan luar Kabupaten Muara Enim	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1 Laporan	17.331.600
2	16	03	2.02	0016	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Kabupaten Muara Enim	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	1 Dokumen	90.000.000	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Kabupaten Muara Enim	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	1 Dokumen	90.000.000
2	16	03	2.02	0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1 dokumen	115.526.700	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1 dokumen	115.526.700
2	16	03	2.02	0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Kabupaten Muara Enim	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SP	3 Aplikasi	1.120.047.550	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Kabupaten Muara Enim	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SP	3 Aplikasi	1.120.047.550
				0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Kabupaten Muara Enim	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	36 OPD	325.635.200	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Kabupaten Muara Enim	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	36 OPD	325.635.200

				0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kabupaten Muara Enim	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	58 OPD	6.311.287.000	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kabupaten Muara Enim	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	58 OPD	6.311.287.000
				0027	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Kabupaten Muara Enim	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	2 Program	3.811.986.100	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Kabupaten Muara Enim	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	2 Program	3.811.986.100
				0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	58 OPD	3.800.975.900	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	58 OPD	3.800.975.900
2	20				Urusan Pemerintahan Bidang Statistik				461.838.400,00	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik				461.838.400,00
2	20	02			Program Penyelenggaraan Statistik Sektor		Persentase data statistik sektoral yang di mutakhirkan	100%	461.838.400,00	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor		Persentase data statistik sektoral yang di mutakhirkan		461.838.400,00
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah media penyajian data statistik sektoral	3 (IPM, Sosial Ekonomi Kabupaten Muara Enim dan Aplikasi Sister)	461.838.400,00	Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah media penyajian data statistik sektoral	3 (IPM, Sosial Ekonomi Kabupaten Muara Enim dan Aplikasi Sister)	461.838.400,00

2	20	02	2.01	0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kabupaten Muara Enim	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	100 Orang	63.710.900	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kabupaten Muara Enim	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	100 Orang	63.710.900
2	20	02	2.01	0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Kabupaten Muara Enim	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	4 Dokumen (IPM, Analisis Gini Ratio, INSOS EK dan Pembangunan Podes)	398.127.500	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Kabupaten Muara Enim	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	4 Dokumen (IPM, Analisis Gini Ratio, INSOS EK dan Pembangunan Podes)	398.127.500
2	21				Urusan Pemerintahan Bidang Persandian				411.657.200,00	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian				411.657.200,00
2	21	02			Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi		Persentase terpenuhinya keamanan Informasi Pemerintah Daerah	90%	411.657.200,00	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi		Persentase terpenuhinya keamanan Informasi Pemerintah Daerah	90%	411.657.200,00
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase informasi sandi yang diamankan	100%	271.004.400,00	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase informasi sandi yang diamankan	100%	271.004.400,00

2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	4 Laporan	174.353.100	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	4 Laporan	174.353.100
2	21	02	2.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	58 OPD	96.651.300	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	58 OPD	96.651.300
2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah kabupaten/Kota		Jumlah OPD yang melaksanakan jaring komunikasi sandi	17 OPD	140.652.800,00	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah kabupaten/Kota	Kabupaten Muara Enim	Jumlah OPD yang melaksanakan jaring komunikasi sandi	17 OPD	140.652.800,00
2	21	02	2.02	0001	Operasioanalisis Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	17 OPD	140.652.800	Operasioanalisis Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Muara Enim	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	17 OPD	140.652.800
JUMLAH TOTAL									31.556.984.664,00			-		31.556.984.664,00

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam melaksanakan Tupoksi sebagai tugas pokok pemberdayaan komunikasi dan informatika program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian lebih banyak pada kegiatan non fisik dibandingkan kegiatan fisik. Sejalan dengan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD sampai saat ini usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat yaitu usulan masyarakat dari Kecamatan-Kecamatan usulan berupa Pembangunan tower jaringan seluler, Penyediaan layanan hotspot internet ruang publik, sedangkan dari fraksi fraksi di DPR diusulkan ke Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yaitu untuk Memasang Jaringan Internet di desa-desa yang masih Blank Spot untuk dianggarkan dan meminta kegiatan tersebut bisa di pertahankan di masa-masa yang akan datang.

Untuk pembagunan tower jaringan seluler , Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tidak bisa memenuhi karena pembagunan tower tersebut bukanlah kewenangan daerah melaikan kewenangan pusat, dalam hal ini dinas komunikasi dan informatika bisa menjembatani agar desa yang mengusulkan pembangunan tower tersebut bisa mengajukan proposal yang ditujukan kepada ATSI melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian , sedangkan terhadap usulan DPR Memasang Jaringan Internet di desa-desa yang masih Blank Spot sudah dipasang vsat dan dianggarkan mulai dari tahun 2021 s.d tahun anggaran 2025 tetap dianggarkan.

Tabel 2.8						
Usulan Program Dan Kegiatan Dari Pada Pemangku Kepentingan						
Tahun 2025						
Kabupaten Muara Enim						
Nama Skpd : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian						
NO	Program /Kegiatan	Lokasi	Kecamatan	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4		5	6
	Program Aplikasi Informatika					
1	Peningkatan sinyal Seluler dari 2G ke 4G	Dusun I Mililian, Kab. Muara Enim	Gelumbang	Tingkat Kecepatan sinyal seluler	2G ke 4G	
2	Peningkatan sinyal Seluler dari 2G ke 4G	Dusun I Desa Teluk Limau, Kab. Muara Enim	Gelumbang	Tingkat Kecepatan sinyal seluler	2G ke 4G	
3	Peningkatan sinyal Seluler dari 2G ke 4G	Desa Bitis, Kab. Muara Enim	Gelumbang	Tingkat Kecepatan sinyal seluler	2G ke 4G	
4	Peningkatan sinyal Seluler dari 2G ke 4G	Dusun 2 Desa Midar, Kab. Muara Enim	Gelumbang	Tingkat Kecepatan sinyal seluler	2G ke 4G	
5	Peningkatan sinyal Seluler dari 2G ke 4G	Dusun 1 Mililian, Kab. Muara Enim	Gelumbang	Tingkat Kecepatan sinyal seluler	2G ke 4G	
6	Penyediaan Layanan hotspot internet ruang publik	Desa Pagar Dewa, Kab. Muara Enim	Tanjung Agung	Jumlah hotspot internet ruang publik	1 Titik	
7	Penyediaan Layanan hotspot internet ruang publik	Dusun III Hidup Baru, Kab. Muara Enim	Benakat	Jumlah hotspot internet ruang publik	1 Titik	
8	Peningkatan sinyal Seluler dari 2G ke 4G	Desa Lubuk Raman, Kab. Muara Enim	Rambang Niru	Tingkat Kecepatan sinyal seluler	2G ke 4G	
9	Peningkatan sinyal Seluler dari 2G ke 4G	Desa Air Cekdam, Kab. Muara Enim	Rambang Niru	Tingkat Kecepatan sinyal seluler	2G ke 4G	
10	Peningkatan sinyal Seluler dari 2G ke 4G	Dusun 2 dan Dusun 4 Pagar Dewa, Kab. Muara Enim	Lubai Ulu	Tingkat Kecepatan sinyal seluler	2G ke 4G	

11	Peningkatan sinyal Seluler dari 2G ke 4G	Desa Mekar Jaya, Lubai Ulu, Kab. Muara Enim	Lubai Ulu	Tingkat Kecepatan sinyal seluler	2G ke 4G	
12	Peningkatan sinyal Seluler dari 2G ke 4G	Dusun 4 Lubai Persada, Kab. Muara Enim	Lubai Ulu	Tingkat Kecepatan sinyal seluler	2G ke 4G	
13	Peningkatan sinyal Seluler dari 2G ke 4G	Dusun 3 Karang Sari, Kab. Muara Enim	Lubai Ulu	Tingkat Kecepatan sinyal seluler	2G ke 4G	
14	Peningkatan sinyal Seluler dari 2G ke 4G	Dusun 1 dan Dusun 2 tanjung baru, Kab. Muara Enim	Lembak	Tingkat Kecepatan sinyal seluler	2G ke 4G	
15	Penyediaan Layanan hotspot internet ruang publik	Dusun I dan Dusun II Kemang, Kab. Muara Enim	Lembak	Jumlah hotspot internet ruang publik	2 Titik	
16	Penyediaan Layanan hotspot internet ruang publik	Dusun 2 Tanjung Baru, Kab. Muara Enim	Lembak	Jumlah hotspot internet ruang publik	1 Titik	
17	Peningkatan sinyal Seluler dari 2G ke 4G	Desa Lubuk Enau, Kab. Muara Enim	Lembak	Tingkat Kecepatan sinyal seluler	2G ke 4G	
18	Penyediaan Layanan hotspot internet ruang publik	Desa Petanang, Kab. Muara Enim	Lembak	Jumlah hotspot internet ruang publik	1 Titik	
19	Peningkatan sinyal Seluler dari 2G ke 4G	Desa Sungai Duren, Kab. Muara Enim	Lembak	Tingkat Kecepatan sinyal seluler	2G ke 4G	
20	Penyediaan Layanan hotspot internet ruang publik	Desa Sungai Duren, Kab. Muara Enim	Lembak	Jumlah hotspot internet ruang publik	1 Titik	
21	Penyediaan Layanan hotspot internet ruang publik	Dusun I-VI Desa Bangun Sari, Kab. Muara Enim	Gunung Megang	Jumlah hotspot internet ruang publik	6 Titik	
22	Peningkatan sinyal Seluler dari 2G ke 4G	Desa Kayu Ara Sakti, Kab. Muara Enim	Gunung Megang	Tingkat Kecepatan sinyal seluler	2G ke 4G	
23	Penyediaan Layanan hotspot internet ruang publik	Dusun II Desa Negeri Agung, Kab. Muara Enim	Rambang	Jumlah hotspot internet ruang publik	1 Titik	
24	Penyediaan Layanan hotspot internet ruang publik	Desa Marga Mulya, Kab. Muara Enim	Rambang	Jumlah hotspot internet ruang publik	1 Titik	
25	Peningkatan sinyal Seluler dari 2G ke 4G	Dusun VI, VII Pagar Agung, Kab. Muara Enim	Rambang	Tingkat Kecepatan sinyal seluler	2G ke 4G	
26	Peningkatan sinyal Seluler dari 2G ke 4G	Dusun II, VI, VII Desa Pagar Agung, Kab. Muara Enim	Rambang	Tingkat Kecepatan sinyal seluler	2G ke 4G	

27	Penyediaan Layanan hotspot internet ruang publik	Desa Babat, Kab. Muara Enim	Belida Darat	Jumlah hotspot internet ruang publik	1 Titik	
28	Peningkatan sinyal Seluler dari 2G ke 4G	Desa Babat, Kab. Muara Enim	Belida Darat	Tingkat Kecepatan sinyal seluler	2G ke 4G	
29	Penyediaan Layanan hotspot internet ruang publik	Dusun IV dan Dusun V, Desa Gunung Raja, Kab. Muara Enim	Lubai	Jumlah hotspot internet ruang publik	2 Titik	
30	Peningkatan sinyal Seluler dari 2G ke 4G	Dusun 1,2 dan 3 Menanti, Kab. Muara Enim	Lubai	Tingkat Kecepatan sinyal seluler	2G ke 4G	
31	Penyediaan Layanan hotspot internet ruang publik	Dusun V Jiwa Baru, Kab. Muara Enim	Lubai	Jumlah hotspot internet ruang publik	1 Titik	
32	Penyediaan Layanan hotspot internet ruang publik	Dusun 1,2,3 Air Asam, Kab. Muara Enim	Lubai	Jumlah hotspot internet ruang publik	3 Titik	
33	Pengadaan Jaringan Internet (WIFI)	Dusun VIII Desa Ujan Mas Baru, Kab. Muara Enim	Ujan Mas	Jumlah hotspot internet ruang publik	1 Titik	
34	Penyediaan Layanan hotspot internet ruang publik	Desa Muara Gula Baru, Kab. Muara Enim	Ujan Mas	Jumlah hotspot internet ruang publik	1 Titik	
35	Peningkatan sinyal Seluler dari 2G ke 4G	Desa Tanjung Agung, Kab. Muara Enim	Semende Darat Ulu	Tingkat Kecepatan sinyal seluler	2G ke 4G	
36	Peningkatan sinyal Seluler dari 2G ke 4G	Dusun 1,2,3 Desa Danau Gerak, Kab. Muara Enim	Semende Darat Ulu	Tingkat Kecepatan sinyal seluler	2G ke 4G	
37	Peningkatan sinyal Seluler dari 2G ke 4G	Desa Cahaya Alam, Kab. Muara Enim	Semende Darat Ulu	Tingkat Kecepatan sinyal seluler	2G ke 4G	

BAB III	TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
------------	--

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan, kebijakan pembangunan nasional di bidang aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik akan terus dilakukan secara nyata, melalui beberapa langkah berikut :

- a. Memperkuat manajemen dan sistem pelayanan publik;
- b. Penerapan standar pelayanan minimal pelayanan publik;
- c. Pengembangan sistem evaluasi kinerja pelayanan publik.

2. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja

Upaya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah akan terus ditingkatkan melalui kebijakan berikut :

- a. Penataan kelembagaan instansi pemerintah sejalan dengan prinsip *structure follow function*;
- b. Pengembangan sistem ketatalaksanaan untuk mendukung peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses kerja pemerintahan;
- c. Peningkatan profesionalisme, netralitas dan kesejahteraan SDM aparatur;
- d. Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

3. Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi

Dalam rangka pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Peningkatan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi instansi;
- b. Pemberdayaan SDM aparatur untuk mendukung pelaksanaan reformasi;
- c. Perluasan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah pusat dan daerah.

Perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim disusun dengan memperhatikan Kebijakan nasional serta juga mempertimbangkan asas kesinambungan dengan program-program pembangunan yang termuat dalam RPD Kabupaten Muara Enim. Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muara Enim yang berisi sasaran, arah kebijakan, program, dan kegiatan pokok, menjadi rujukan sekaligus landasan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Sehingga program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim telah sesuai dengan kebijakan nasional yang gunanya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim

1. Tujuan

Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan renstra perangkat daerah tahun 2024 – 2026 dengan memperhatikan tujuan, sasaran rencana pembangunan daerah kabupaten tahun 2024-2026 dan norma standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan kewenangan daerah. Sehingga Tujuan sebagai berikut :

- Meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

2. Sasaran

1. Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
2. Meningkatnya keterbukaan informasi

Berdasarkan uraian tujuan dan sasaran tersebut, maka indikator kinerja tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, Renstra Dinas Kominfo Tahun 2024-2026
Kabupaten Muara Enim

Tujuan		Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target				Kondisi kinerja akhir renstra
				2023	2024	2025	2026		
1.	Meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks SPBE	3.00	3.00	3.1	3.2		3.2
		Meningkatnya Keterbukaan Informasi	Persentase informasi publik yang tersedia dan diumumkan sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	100%	100%	100%	100%		100%

3.3. Program dan Kegiatan

Beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut Program SKPD merupakan Program prioritas RPD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana Program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per SKPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPD, selanjutnya dijabarkan SKPD di dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini di dasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD dimana penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rencana pembangunan daerah dan renstra perangkat daerah dengan memperhatikan penyelarasan program prioritas nasional RPJMN tahun 2020 – 2024, evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome) renstra perangkat daerah, evaluasi kontribusi (output) dari seluruh kegiatan/sub kegiatan sampai dengan tahun 2024 dalam pencapaian hasil (outcome), isu-isu

strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan rancangan awal SKPD, Program/kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai 5 (Lima) rumusan program, 14 (empat belas) kegiatan dan 45 (empat puluh lima) sub kegiatan. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yaitu :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD
 - b. Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - f. Evaluasi kinerja perangkat daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - b. Koordinasi Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
 - c. koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Pengamanan barang milik daerah SKPD.
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi.
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d. Penyediaan bahan logistik kantor
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- g. Fasilitas kunjungan tamu ditargetkan
- h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 6. Kegiatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan kendaraan dinas operasional/lapangan
 - b. Pengadaan mebel
- 7. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- 8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. Program Informasi dan Komunikasi Publik

- 1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Monitoring opini dan aspirasi publik
 - b. Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
 - c. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
 - d. Pengelolaan media komunikasi publik

- e. Pelayanan informasi publik
- f. Layanan hubungan media
- g. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
- h. Penyelenggaraan hubungan masyarakat

III. Program Aplikasi Informatika

1. Kegiatan Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan pemerintah pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah
2. Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - c. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik.
 - d. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas.
 - e. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah.

IV. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral.
 - b. Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi.

V. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
 - b. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah kabupaten/Kota

a. Operasioanalisis Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

Rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Muara Enim

Nama SKPD : Dinas Komunikasi, Informatika, Stataistik dan Persandian

Kode					Urusan/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2					Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar				31.556.984.664,00		-		33.161.696.198,70
2	16	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah		100%	30.683.489.064,00		-	100%	32.200.851.038,70
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan yang dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu		100%	60.521.200,00		-	100%	66.573.320,00
2	16	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Muara Enim	1 dokumen	24.197.600	APBD Kabupaten Muara Enim	-	1 dokumen	26.617.360,00
2	16	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Muara Enim	1 dokumen	10.548.200	APBD Kabupaten Muara Enim	-	1 dokumen	11.603.020,00
2	16	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kabupaten Muara Enim	1 dokumen	7.050.000	APBD Kabupaten Muara Enim	-	1 dokumen	7.755.000,00

2	16	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Muara Enim	1 dokumen	7.050.000	APBD Kabupaten Muara Enim	-	1 dokumen	7.755.000,00
2	16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Muara Enim	12 laporan	5.337.300	APBD Kabupaten Muara Enim	-	12 laporan	5.871.030,00
2	16	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Muara Enim	5 Laporan	6.338.100	APBD Kabupaten Muara Enim	-	5 Laporan	6.971.910,00
											-		
1	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu	Kabupaten Muara Enim		4.706.285.628,00		-	0%	5.176.914.194,00
1	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Muara Enim	38 Orang	4.694.151.028	APBD Kabupaten Muara Enim	-	38 Orang	5.163.566.134,00
1	16	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dalam dan Luar Kabupaten Muara Enim	1 Laporan	6.322.500	APBD Kabupaten Muara Enim	-	1 Laporan	6.954.750,00
1	16	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Muara Enim	2 Laporan	5.812.100	APBD Kabupaten Muara Enim	-	2 Laporan	6.393.310,00
											-		

2	16	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah		100%	36.030.750,00		-	100%	39.633.825,00
2	16	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Muara Enim	3 Dok	36.030.750,00	APBD Kabupaten Muara Enim	-	3 Dok	39.633.825,00
											-		
2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	76.500.000,00		-	100%	84.150.000,00
2	16	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kabupaten Muara Enim	21 Orang	76.500.000,00	APBD Kabupaten Muara Enim	-	21 Orang	84.150.000,00
											-		
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah		100%	1.416.804.399,00		-	100%	1.559.595.630,00
2	16	01	2.06	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Muara Enim	1 Paket	22.795.400	APBD Kabupaten Muara Enim	-	1 Paket	25.074.940,00
2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Muara Enim dan luar Kabupaten Muara Enim	8 Paket	228.027.500	APBD Kabupaten Muara Enim	-	8 Paket	250.830.250,00
2	16	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kabupaten Muara Enim	2 Paket	44.461.099	APBD Kabupaten Muara Enim	-	2 Paket	50.018.000,00
2	16	01	2.06	0004	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Muara Enim	2 Paket	147.874.300	APBD Kabupaten Muara Enim	-	2 Paket	162.661.730,00

2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Muara Enim	1 Paket	42.507.800	APBD Kabupaten Muara Enim	-	1 Paket	46.758.580,00
2	16	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kabupaten Muara Enim	10 Dokumen	13.574.000	APBD Kabupaten Muara Enim	-	10 Dokumen	14.931.400,00
2	16	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Muara Enim	12 Laporan	8.258.400	APBD Kabupaten Muara Enim	-	12 Laporan	9.084.240,00
2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Muara Enim dan luar Kabupaten Muara Enim	150 laporan	909.305.900	APBD Kabupaten Muara Enim	-	150 laporan	1.000.236.490,00
											-		
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		100%	10.000.000,00		-	100%	18.181.279,00
2	16	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kabupaten Muara Enim	1 Unit Kendaraan Dinas Roda 2	-		-	1 Unit Kendaraan Dinas Roda 2	0,00
2	16	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kabupaten Muara Enim	2 Paket	10.000.000	APBD Kabupaten Muara Enim	-	2 Paket	18.181.279,00
											-		
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100%	300.884.750,00		-	100%	330.973.225,00
2	16	01	2.08	0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Muara Enim	2 Laporan	9.517.200	APBD Kabupaten Muara Enim	-	2 Laporan	10.468.920,00

2	16	01	2.08	0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Muara Enim	3 Laporan	171.007.550	APBD Kabupaten Muara Enim	-	3 Laporan	188.108.305,00
2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Muara Enim	3 Laporan	120.360.000	APBD Kabupaten Muara Enim	-	3 Laporan	132.396.000,00
											-		
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara		100%	729.208.287,00		-	100%	802.129.115,70
2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Muara Enim	19 Unit	314.998.287	APBD Kabupaten Muara Enim	-	100%	346.498.115,70
2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Muara Enim	1 Gedung Kantor	365.800.000	APBD Kabupaten Muara Enim	-	1 Gedung Kantor	402.380.000,00
2	16	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Muara Enim	2 Jenis	24.950.000	APBD Kabupaten Muara Enim	-	2 Jenis	27.445.000,00
2	16	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Muara Enim	2 Jenia	23.460.000	APBD Kabupaten Muara Enim	-	2 Jenia	25.806.000,00
											-		
2	16				Urusan Pemerintahan Bidang komunikasi dan Informatika				23.347.254.050,00		-		24.122.700.450,00
2	16	02			Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi yang didiseminasikan dan dipublikasikan		100%	7.754.464.000,00		-	100%	8.529.910.400,00

2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media komunikasi publik yang dikelola		6 Jenis Media (Media cetak, Media Penyiaran, Media Daring, Media Sosial, Media Luar Ruang dan Media Tatap Muka)	7.754.464.000,00		-	6 Jenis Media (Media cetak, Media Penyiaran, Media Daring, Media Sosial, Media Luar Ruang dan Media Tatap Muka)	8.529.910.400,00
2	16	02	2.01	0014	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Kabupaten Muara Enim	612 Laporan	5.714.554.300	APBD Kabupaten Muara Enim	-	612 Laporan	6.286.009.730,00
2	16	02	2.01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Kabupaten Muara Enim	50 Kelompk	138.163.900	APBD Kabupaten Muara Enim	-	50 Kelompk	151.980.290,00
2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Kabupaten Muara Enim	10 Permohonan	108.486.800	APBD Kabupaten Muara Enim	-	10 Permohonan	119.335.480,00
2	16	02	2.01	0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Kabupaten Muara Enim	52 Rekomendasi	256.597.300	APBD Kabupaten Muara Enim	-	52 Rekomendasi	282.257.030,00
2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Kabupaten Muara Enim	12 Media	531.268.200	APBD Kabupaten Muara Enim	-	12 Media	584.395.020,00

	16	02	2.01	0023	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Kabupaten Muara Enim	100 Konten	1.005.393.500	APBD Kabupaten Muara Enim	-	100 Konten	1.105.932.850,00
2	16	03			Program Aplikasi Informatika	Persentase terlayannya kebutuhan aptika OPD		100%	15.592.790.050,00		-	100%	15.592.790.050,00
2	16	03	2.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				15.592.790.050,00		-		17.152.069.055,00
2	16	03	2.02	0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Kabupaten Muara Enim dan luar Kabupaten Muara Enim	1 Laporan	17.331.600	APBD Kabupaten Muara Enim	-	1 Laporan	19.064.760,00
2	16	03	2.02	0016	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	Kabupaten Muara Enim	1 Dokumen	90.000.000	APBD Kabupaten Muara Enim	-	1 Dokumen	99.000.000,00
2	16	03	2.02	0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Kabupaten Muara Enim	1 dokumen	115.526.700	APBD Kabupaten Muara Enim	-	1 dokumen	127.079.370,00
2	16	03	2.02	0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SP	Kabupaten Muara Enim	3 Aplikasi	1.120.047.550	APBD Kabupaten Muara Enim	-	3 Aplikasi	1.232.052.305,00
2	16	03	2.02	0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	Kabupaten Muara Enim	36 OPD	325.635.200	APBD Kabupaten Muara Enim		36 OPD	358.198.720,00
2	16	03	2.02	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kabupaten Muara Enim	58 OPD	6.311.287.000	APBD Kabupaten Muara Enim		58 OPD	6.942.415.700,00

2	16	03	2.02	0027	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	Kabupaten Muara Enim	2 Program	3.811.986.100	APBD Kabupaten Muara Enim		2 Program	4.193.184.710,00
2	16	03	2.02	0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Kabupaten Muara Enim	58 OPD	3.800.975.900	APBD Kabupaten Muara Enim		58 OPD	4.181.073.490,00
2	20				Urusan Pemerintahan Bidang Statistik				461.838.400,00		-		508.022.240,00
2	20	02			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data statistik sektoral yang di mutakhirkan		100%	461.838.400,00		-	100%	508.022.240,00
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media penyajian data statistik sektoral		3 (IPM, Sosial Ekonomi Kabupaten Muara Enim dan Aplikasi Sister)	461.838.400,00		-	3 (IPM, Sosial Ekonom i Kabupaten Muara Enim dan Aplikasi Sister)	508.022.240,00
2	20	02	2.01	0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Kabupaten Muara Enim	100 Orang	63.710.900	APBD Kabupaten Muara Enim	-	100 Orang	70.081.990,00
2	20	02	2.01	0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Kabupaten Muara Enim	4 Dokumen (IPM, Analisis Gini Ratio, INSOSEK dan Pembinaan Podes)	398.127.500	APBD Kabupaten Muara Enim	-	4 Dokumen (IPM, Analisis Gini Ratio, INSOSEK dan Pembinaan Podes)	437.940.250,00
											-		
2	21				Urusan Pemerintahan Bidang Persandian				411.657.200,00		-		452.822.920,00

2	21	02			Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase terpenuhinya keamanan Informasi Pemerintah Daerah		90%	411.657.200,00		-	90%	452.822.920,00
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi sandi yang diamankan		100%	271.004.400,00		-	100%	298.104.840,00
2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kabupaten Muara Enim	4 Laporan	174.353.100	APBD Kabupaten Muara Enim	-	4 Laporan	191.788.410,00
2	21	02	2.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Kabupaten Muara Enim	58 OPD	96.651.300	APBD Kabupaten Muara Enim	-	58 OPD	106.316.430,00
2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang melaksanakan jaring komunikasi sandi		17 OPD	140.652.800,00		-	17 OPD	154.718.080,00
2	21	02	2.02	0001	Operasioanalisis Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Kabupaten Muara Enim	17 OPD	140.652.800	APBD Kabupaten Muara Enim	-	17 OPD	154.718.080,00
JUMLAH TOTAL									31.556.984.664,00				33.161.696.198,70

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Mempedomani RKPD Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025 serta Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2024 – 2026.
2. Mempedomani perencanaan dan monitoring atau pengendalian serta evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim yang memuat pokok-pokok kebijakan dan pokok-pokok program dan kegiatan pembangunan dibidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian serta bidang Statistik.
3. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
4. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan/sub kegiatan.
5. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program /kegiatan/sub kegiatan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim tahun 2025 disusun dengan tujuan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajibannya yang ditentukan oleh peraturan perundangan tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, khususnya dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah kabupaten. Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 ini telah mencoba untuk memperjelas pengertian, ruang lingkup dan sebagai pedoman SKPD Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim dalam penyusunan RKA SKPD tahun 2025.

Pedoman ini telah dirancang dengan pendekatan bersinergi sehingga dapat melakukan penyesuaian-peyesuaian sesuai dengan kondisi dan perkembangan kemampuan dan kapasitas perencanaan pada SKPD Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim, namun tetap mengindahkan ketentuan-ketentuan yang bersifat perinsip sebagaimana terkandung dalam Undang-undang 25 Tahun 2004 dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Agar pedoman ini dapat digunakan secara efektif, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim akan mensosialisasikan pedoman ini di lingkup SKPD Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dan menyusun Peraturan Kepala SKPD tentang Penyusunan Renja SKPD.

Muara Enim Januari 2024

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
Statistik dan Persandian
Kabupaten Muara Enim



Ardian Arifanardi, AP., M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 197407201993111001